



Desa Kaliorang
Kec. Kaliorang, Kab. Kutai Timur
Prov. Kalimantan Timur



Sanggar
Inovasi Desa

LAPORAN ASSESSMENT POTENSI DESA KALIORANG

Program Transformasi Desa Kaliorang, Kecamatan
Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur.

Disusun oleh : Yayasan Sanggar Inovasi Desa (YSID)



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAB I	4
PENDAHULUAN	4
I. Latar Belakang	4
II. Ruang Lingkup dan Tujuan	5
III. Pendekatan dan Metode Analisis	5
IV. Indikator Pengukuran	5
A. Tata Kelola Pemerintahan Desa	6
B. Ekonomi	6
C. Sosial dan Budaya	7
V. Waktu Pelaksanaan dan Sasaran	8
BAB II	11
HASIL ASSESSMENT DAN OVERVIEW	11
I. Deskripsi Umum	11
A. Pemerintahan	11
1. Kapasitas Sosial	11
2. Kapasitas Politik dan Kepemimpinan	13
3. Kapasitas Proses dan Birokrasi	17
B. Ekonomi	21
1. Komoditas Pisang	21
2. Komoditas Sawit	23
3. Perikanan	23
4. Lembaga Ekonomi Desa (BUMDES)	24
5. Pokdarwis - Pengelolaan Pantai Marang	25
6. UMKM	25
C. Sosial dan Budaya	26
1. Aspek Keberdayaan Sosial	26
2. Peran Perempuan dan kelompok marginal	27
3. Aspek dinamika Sosial	29
Dinamika Sosial Budaya dan Potensi Ketegangan Komunal di Desa Kaliorang, Kutai Timur	29
Persoalan kaum Muda, Balapan motor dan keresahan orang tua	30
Pernikahan dini	31
Facebook dan Interaksi Media Sosial	32
4. Aspek Pelestarian Budaya	33
Minimnya Aktivitas Seni dan Budaya	33
Budaya yang Terpinggirkan dari Ruang Hidup Bersama dan Potensi Tersembunyi	33



Belum terlihat dukungan pemerintah Desa untuk aktivasi aspek seni dan budaya	34
Belum terlihat dukungan pemerintah Desa untuk aktivasi aspek seni dan budaya	36
5. Aspek Pendidikan dan Ketenagakerjaan	37
Kualitas pendidikan: kualitas literasi dan numerasi yang masih rendah.	37
Relevansi Pendidikan dengan Kebutuhan Lokal: Kesenjangan Kurikulum SMK dengan Kebutuhan Perusahaan, dan kematangan personal calon pekerja.	41
Absennya kolaborasi pemerintah-keluarga-Warga-dan sekolah	43
Bekerja di tambang sebagai cita-cita anak-anak muda	45
6. Aspek Lingkungan dan Kesehatan	45
Akses layanan Kesehatan dan status Kesehatan Masyarakat	45
Stunting	48
Perilaku hidup sehat dan kesadaran Masyarakat tentang Kesehatan masih rendah.	49
Kualitas lingkungan dan Perilaku hidup sehat	50
II. Isu-isu Strategis dan Temuan Kunci	52
A. Aspek pemerintahan	52
B. Aspek ekonomi	53
C. Aspek sosial dan budaya	53
BAB III	55
REKOMENDASI ATAS HASIL ASSESSMENT	55
I. REKOMENDASI AREA PERBAIKAN STRATEGIS	55
A. Tata Kelola Pemerintah Desa	55
1. Kepatuhan Regulasi (Regulatory Compliance) dan Standarisasi Layanan	55
2. Data dan Kebijakan Berbasis Bukti	55
3. Aset Desa	55
4. Distribusi Sebagian Kewenangan	56
B. Ekonomi	56
C. Sosial dan Budaya	57
1. Penyediaan ruang public kreatif (Kaliorang Creative Space)	57
Penyelenggaraan Pasar Event	57
Penyediaan ruang publik kreatif pemuda	57
2. Program Desa Layak Anak	58
Desa Layak Anak	58
Aktivasi posyandu remaja	59
Program Desa Ramah lansia	59
BAB IV	60
ROADMAP DAN DESAIN PROGRAM	60
TAHAP I - 2025	60
A. Desain Program	60
B. Roadmap	62



BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Transformasi menuju kemandirian desa memerlukan proses yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Kepemimpinan desa yang kuat dan visioner sangat penting, namun tidak akan efektif tanpa partisipasi aktif warga dalam pembangunan. Sayangnya, minimnya keterlibatan masyarakat sering kali membuat program desa hanya bersifat administratif tanpa dampak nyata bagi warga. Oleh karena itu, langkah awal yang krusial adalah mengenali dan memetakan potensi desa agar pembangunan dapat berjalan secara strategis dan berbasis pada kebutuhan serta sumber daya lokal.

Desa Kaliorang, yang terletak di Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur, memiliki kekayaan sumber daya alam dan budaya yang berpotensi menjadi motor penggerak ekonomi dan sosial. Namun, tanpa strategi pengelolaan yang tepat, potensi ini bisa tidak termanfaatkan secara optimal. Tantangan utama yang dihadapi adalah belum adanya pemetaan yang komprehensif terhadap potensi desa, sehingga pengelolaan sumber daya dan infrastruktur belum berjalan secara terarah. Selain itu, akses terhadap ruang publik yang inklusif masih terbatas, menghambat perkembangan interaksi sosial dan kegiatan ekonomi masyarakat.

Melihat pengalaman sukses Desa Panggunharjo sebagai desa mandiri yang berbasis pada pengelolaan potensi lokal, Desa Kaliorang berupaya melakukan transformasi serupa. Namun, upaya ini membutuhkan strategi yang terencana dan berbasis data. Oleh karena itu, dilakukan assessment untuk mengidentifikasi potensi desa secara holistik, merancang strategi pembangunan yang tepat, serta menguatkan kapasitas pemerintah desa dan masyarakat dalam mengelola serta mengembangkan potensi yang ada. Dengan pemetaan yang komprehensif, Desa Kaliorang dapat menentukan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kekuatan lokal. Pendekatan berbasis data ini akan meminimalkan risiko pengelolaan sumber daya yang tidak efisien. Selain itu, harapan bahwa Desa Kaliorang menjadi Hub Pembelajaran Antar Desa juga dapat dicapai dengan model pembangunan berbasis kemandirian lokal yang berkelanjutan melalui pendekatan yang terstruktur dan partisipatif.



II. Ruang Lingkup dan Tujuan

Kegiatan assessment dilakukan untuk menggali potensi dan tantangan Desa Kaliorang dalam melakukan transformasi, yang kemudian dibagi ke dalam tiga (3) aspek, meliputi :

1. Pemerintahan : Kelembagaan, kebijakan, serta kapasitas aparatur desa
2. Ekonomi : Sumber daya ekonomi, usaha masyarakat, serta peluang investasi
3. Sosial, budaya dan pemberdayaan : Pendidikan, kesehatan, struktur sosial, kearifan lokal, dan dinamika budaya masyarakat

Adapun tujuan dalam melakukan kegiatan Assessment, yaitu untuk mengidentifikasi potensi dan tantangan dalam pengelolaan pemerintah desa, menganalisis kekuatan dan peluang ekonomi yang dapat dikembangkan, serta memahami aspek sosial budaya yang dapat mendukung mendukung pembangunan berkelanjutan. Tim YSID akan mencari detail persoalan, perubahan, dan kemajuan setiap aspek di atas, serta mengkaji kesesuaian antara dokumen, jawaban, dan fakta di lapangan. Melalui data yang didapatkan, YSID kemudian menetapkan standar pola pendampingan: aplikatif, sistematis, sinergis. Juga Menyusun rekomendasi strategis untuk pengembangan desa Kaliorang, termasuk menyusun deck pembelajaran selama pendampingan.

III. Pendekatan dan Metode Analisis

Assessment ini menggunakan pendekatan partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah desa, tokoh masyarakat, lembaga desa, pelaku usaha, serta komunitas lokal. Adapun metode yang digunakan meliputi :

1. Wawancara mendalam : Dilakukan terhadap aktor kunci di bidang pemerintahan, ekonomi, dan social budaya
2. Diskusi Kelompok Terarah (FGD) : Untuk menggali perspektif masyarakat secara kolektif
3. Observasi lapangan : Untuk melihat kondisi faktual desa secara langsung
4. Analisis Data Sekunder : Menggunakan data statistik serta berbagai dokumen perencanaan desa yang telah ada

IV. Indikator Pengukuran

Untuk memastikan hasil assessment dapat diukur secara objektif, digunakan beberapa indikator utama, yaitu:



A. Tata Kelola Pemerintahan Desa

<p>1. Kapasitas Sosial</p> <p>1.1. Modal Sosial</p> <p>1.2. Kepercayaan Publik</p> <p>1.3. Partisipasi</p>	<p>2. Kapasitas Politik dan Kepemimpinan</p> <p>2.1. Kapasitas Regulasi</p> <p>2.2. Kapasitas Ekstraktif</p> <p>2.3. Kapasitas Distributif</p> <p>2.4. Kapasitas Responsif</p> <p>2.5. Kapasitas Jaringan</p> <p>2.6. Proses Pencalonan dan Pemilihan</p>	<p>3. Kapasitas Proses dan Birokrasi</p> <p>3.1. Pola Relasi antara Pemerintah Desa dan Warga</p> <p>3.2. Tata Organisasi Pemerintah Desa</p> <p>3.3. Membangun Kultur Reformasi Birokrasi</p> <p>3.4. Transparansi</p> <p>3.5. Penganggaran</p> <p>3.6. Sistem Informasi Desa</p> <p>3.7. Pelaporan dan pertanggungjawaban</p>
---	--	--

B. Ekonomi

<p>1. Kapasitas Sosial</p> <p>1.1. Tingkat keterlibatan masyarakat dalam sektor ekonomi (petani, nelayan, UMKM, industri kreatif, dll.)</p> <p>1.2. Keberadaan kelompok ekonomi berbasis komunitas (koperasi, BUMDes, kelompok tani, dll.)</p> <p>1.3. Akses masyarakat terhadap modal dan sumber pendanaan (hibah, kredit usaha, investor, dll.)</p> <p>1.4. Dukungan sosial terhadap kelompok rentan dalam ekonomi (pengangguran, perempuan, penyandang disabilitas, dll.)</p> <p>1.5. Daya beli masyarakat dan tingkat konsumsi lokal</p>	<p>2. Kapasitas Produksi dan Kewirausahaan</p> <p>2.1. Keberagaman jenis usaha dan sektor ekonomi desa</p> <p>2.2. Tingkat adopsi teknologi dalam proses produksi (pertanian modern, mesin industri, digitalisasi, dll.)</p> <p>2.3. Keberadaan pelatihan keterampilan kerja dan kewirausahaan berbasis potensi desa</p> <p>2.4. Tingkat inovasi produk/jasa berbasis kearifan lokal</p> <p>2.5. Akses terhadap bahan baku dan sarana produksi</p>
<p>3. Kapasitas Pasar dan Rantai Nilai</p> <p>3.1. Tingkat pemasaran produk lokal di dalam dan luar desa</p>	<p>4. Kapasitas Tata Kelola Ekonomi Desa</p>



<p>3.2. Akses desa terhadap jaringan distribusi dan logistik (transportasi, e-commerce, reseller, dll.)</p> <p>3.3. Keberadaan branding dan pengemasan produk lokal yang kompetitif</p> <p>3.4. Keterlibatan desa dalam jejaring bisnis (kemitraan dengan perusahaan, koperasi, dll.)</p> <p>3.5. Tingkat ekspor produk desa ke luar daerah</p>	<p>4.1. Keberadaan kebijakan desa yang mendukung ekonomi lokal (Perdes, insentif UMKM, dll.)</p> <p>4.2. Efektivitas pengelolaan BUMDes dan unit usahanya</p> <p>4.3. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana ekonomi desa</p> <p>4.4. Sinkronisasi program ekonomi desa dengan kebijakan daerah dan nasional</p> <p>4.5. Keberlanjutan program ekonomi desa (diversifikasi usaha, rantai pasok, dll.)</p>
---	--

C. Sosial dan Budaya

<p>1. Keberdayaan Sosial</p> <p>1.1. Kepedulian sosial antar warga (gotong royong, solidaritas sosial, dll.)</p> <p>1.2. Keberadaan kelompok sosial yang aktif (karang taruna, PKK, komunitas keagamaan, dll.)</p> <p>1.3. Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial desa</p> <p>1.4. Peran perempuan dan kelompok marjinal dalam kehidupan sosial desa</p> <p>1.5. Daya dukung masyarakat terhadap program pendidikan dan kesehatan</p>	<p>5. Dinamika Sosial</p> <p>5.1. Tingkat konflik sosial dan mekanisme penyelesaiannya</p> <p>5.2. Migrasi penduduk dan dampaknya terhadap desa</p> <p>5.3. Pergeseran nilai dan norma sosial dalam masyarakat</p> <p>5.4. Adaptasi masyarakat terhadap perkembangan teknologi dan informasi</p> <p>5.5. Tingkat interaksi sosial lintas generasi</p>	<p>6. Pelestarian Budaya</p> <p>6.1. Keberadaan dan partisipasi dalam kegiatan budaya (upacara adat, kesenian, tradisi lokal, dll.)</p> <p>6.2. Tingkat penggunaan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari</p> <p>6.3. Dukungan desa terhadap pelestarian seni dan budaya lokal</p> <p>6.4. Keberlanjutan warisan budaya dalam generasi muda</p> <p>6.5. Dampak globalisasi terhadap budaya lokal (asimilasi, perubahan nilai, dll.)</p>
--	--	---



<p>7. Pendidikan dan Ketenagakerjaan</p> <p>7.1. Aksesibilitas Pendidikan</p> <p>7.2. Kualitas Pendidikan</p> <p>7.3. Relevansi Pendidikan dengan kebutuhan lokal</p> <p>7.4. Tingkat partisipasi tenaga kerja</p> <p>7.5. Jenis pekerjaan dan sektor ekonomi</p> <p>7.6. Kesejahteraan Tenaga Kerja</p>	<p>8. Lingkungan dan Kesehatan</p> <p>8.1. Akses layanan kesehatan</p> <p>8.2. Status kesehatan masyarakat</p> <p>8.3. Perilaku hidup sehat</p> <p>8.4. Kualitas lingkungan</p> <p>8.5. Pengelolaan Sumber Daya Alam</p> <p>8.6. Kesadaran Ekologi</p>	
---	---	--

V. Waktu Pelaksanaan dan Sasaran

Kegiatan assessment seluruhnya memakai metode FGD dan wawancara langsung ke lapangan dengan menemui narasumber atau perwakilannya yang ditunjuk. Pelaksanaan assessment dilakukan selama tujuh (7) hari, terhitung sejak tanggal 17 - 23 Februari 2025. Rangkaian kegiatan tersebut dimulai dengan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK) antara YSID dengan Pemerintah Desa Kaliorang sekaligus menandai Kick-Off Program Transformasi Desa Kaliorang, dilanjutkan proses assessment dengan wawancara, serta ditutup dengan FGD bersama aktor kunci yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Desa yang berperan penting dalam program ini.



No	Hari/Tanggal	Waktu	Agenda
1	Senin, 17 Februari 2025	12:00	Kedatangan Tim YSID di Kaliorang - Observasi Awal
2	Selasa, 18 Februari 2025	10:00 - 12:00	Kick off program - Penyepakatan kerja sama program - Penandatanganan PKS - Agenda Setting
		12:00 - 18:00	FGD Identifikasi Potensi dan Rancangan Transformasi serta menentukan aktor kunci
3	Rabu, 19 Februari 2025	09:00 - selesai	Assessment awal (identifikasi potensi dan ruang)
4	Kamis, 20 Februari 2025	09:00 - selesai	- Wawancara aktor kunci - Observasi - Studi dokumen
5	Jumat, 21 Februari 2025	09:00 - selesai	Workshop Penguatan Kapasitas Dasar Pemerintahan Desa
		16:00 - selesai	Wawancara tim CSR perusahaan
6	Sabtu, 22 Februari 2025	10:00 - 15:00	Diskusi Temuan Awal dan RTL Program
		20:00 - selesai	Wawancara Sekretaris Desa
7	Minggu, 23 Februari 2025	-	Diskusi RTL bersama Kepala Desa

Adapun proses FGD dan wawancara dilakukan terhadap beberapa aktor kunci yang telah didiskusikan dan ditentukan bersama Tim Transformasi, sebagai berikut :

Aktor Kunci
Aspek Pemerintahan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Perangkat Desa 2. Kepala Dusun 3. Ketua RT 4. LPM - Bpk Saharudin 5. BPD - Bpk M Basri 6. Lembaga adat - Bpk Hj Rustam
Aspek Perekonomian
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua BUMDes (Pak Ali) 2. Pokdarwis (Pak Amrullah) 3. UMKM (Bu Ria) 4. Kelompok Tani (Pak Andi) 5. Kelompok Nelayan (Pak Majid)
Aspek Sosial dan Budaya
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebudayaan (Hj Rustam-Ketua Adat Desa) 2. Bidan Rahma 3. PKK 4. Karang Taruna (Abdul Gani) 5. Keagamaan (Ust Toyib) 6. PAUD - Bu Misna Kepala Sekolah 7. SD - Bu Rahma Kepala Sekolah



8. SMP - Bpk Abdul Kadir
9. Pengrajin - Pak Heru/Pak Kahar

Perusahaan

1. Indexim - Mas Soni
2. KPP - Mas Yoga
3. Kobexindo Semen - Risan
4. KLK - Pak Yadi



BAB II

HASIL ASSESSMENT DAN OVERVIEW

I. Deskripsi Umum

A. Pemerintahan

1. *Kapasitas Sosial*

Desa Kaliorang memiliki keberagaman sosial yang cukup tinggi, terdiri dari suku Bugis, Jawa, Kutai, dan sebagian kecil dari NTT/NTB. Keberagaman ini menciptakan interaksi sosial yang dinamis, namun sekaligus menghadirkan tantangan dalam membangun identitas kolektif desa. Hingga saat ini, belum ditemukan narasi sejarah yang dapat dijadikan sebagai identitas bersama bagi masyarakat Desa Kaliorang. Keberagaman ini berpengaruh terhadap pola interaksi sosial, di mana masing-masing kelompok memiliki budaya, adat istiadat, dan cara berkomunikasi yang berbeda. Hal ini menuntut pemerintah desa untuk memiliki pendekatan yang inklusif dalam mengelola dinamika sosial yang ada.

Di sisi lain, Kepala Desa telah menunjukkan pendekatan komunikasi yang efektif dalam membangun modal sosial dengan masyarakat dan stakeholder. Pendekatan ini terlihat dari bagaimana ia memfasilitasi pembangunan listrik tanpa melibatkan diri dalam kepentingan pribadi, serta cara berkomunikasi yang tidak mempersulit warga dalam mengakses layanan pemerintah desa. Keberhasilannya dalam membangun jaringan dengan pemerintah kabupaten dan dinas terkait juga menjadi indikasi bahwa modal sosial yang dimiliki oleh kepala desa dapat menjadi aset dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Namun, perlu ada upaya lebih lanjut dalam memperkuat kohesi sosial, seperti mengembangkan forum lintas budaya atau kegiatan yang dapat memperkuat identitas kolektif warga desa.

Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap Kepala Desa cukup tinggi, terutama karena proses pemilihannya yang bersih dari politik uang. Dari total 1102 DPT, partisipasi pemilih mencapai 775 orang atau sekitar 70,3%, menunjukkan bahwa masyarakat cukup antusias dalam menentukan pemimpin desa. Kemenangan kepala desa dengan 306 suara sah menandakan bahwa meskipun tidak memperoleh



suara mayoritas mutlak, ia memiliki basis dukungan yang cukup kuat. Kepercayaan ini diperkuat dengan gaya kepemimpinannya yang transparan dan berorientasi pada pembangunan yang nyata. Dalam dua tahun masa kepemimpinannya, Kepala Desa lebih banyak fokus pada pembangunan infrastruktur seperti listrik, jalan, dan sekolah, yang menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat.

Namun, masih terdapat beberapa tantangan dalam mempertahankan kepercayaan publik, terutama dalam aspek non-fisik seperti pendidikan dan ekonomi. Beberapa kelompok masyarakat, terutama generasi muda, masih memiliki tingkat kepercayaan yang rendah terhadap pentingnya pendidikan tinggi karena lebih memilih bekerja di tambang. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara umum Kepala Desa mendapatkan kepercayaan tinggi dalam aspek pembangunan fisik, dalam aspek pembangunan sumber daya manusia masih diperlukan strategi yang lebih efektif. Selain itu, kepercayaan terhadap sistem administrasi desa masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal kejelasan penganggaran dan distribusi bantuan sosial yang masih memiliki beberapa kendala teknis.

Partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan desa cukup aktif, terutama dalam musyawarah dusun dan musyawarah desa. Di Dusun 04 misalnya, partisipasi warga dalam pertemuan desa cukup tinggi, dengan keterlibatan aktif dari RT, BPD, dan tokoh masyarakat. Dalam proses perencanaan pembangunan, tidak ada batasan pos anggaran khusus untuk setiap dusun, sehingga usulan masyarakat dipertimbangkan berdasarkan tingkat urgensinya. Hal ini memberikan kesempatan bagi warga untuk turut serta dalam menentukan prioritas pembangunan. Selain itu, inisiatif warga dalam mengelola pembangunan tanpa terlalu bergantung pada anggaran desa juga terlihat di Dusun 04, di mana beberapa proyek seperti jalan desa lebih banyak menggunakan dana aspirasi dari dewan.

Namun, partisipasi generasi muda dalam kegiatan desa masih terpusat pada aktivitas olahraga yang dikelola oleh Karang Taruna. Kurangnya variasi kegiatan bagi pemuda menyebabkan minimnya ruang bagi mereka untuk mengembangkan ide kreatif dan keterampilan yang lebih luas. Dinamika organisasi kepemudaan masih banyak dipengaruhi oleh inisiatif dari pemerintah desa, sehingga belum berjalan secara mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun partisipasi masyarakat dalam urusan pemerintahan desa cukup baik, partisipasi generasi muda masih perlu



ditingkatkan melalui program yang lebih inklusif dan berbasis pengembangan kapasitas.

2. *Kapasitas Politik dan Kepemimpinan*

Kapasitas Regulasi

Pemerintah Desa Kaliorang memiliki sistem regulasi yang cukup baik, terutama dalam aspek administrasi kependudukan dan pertanahan. Kaur Pemerintahan bertanggung jawab dalam pengurusan dokumen kependudukan, surat tanah, dan berbagai layanan administratif lainnya. Namun, salah satu tantangan besar dalam regulasi desa adalah permasalahan legalitas lahan. Hingga saat ini, sekitar 50-75% tanah di luar HGU perusahaan sawit telah bersertifikat, namun masih banyak lahan yang bermasalah akibat kurangnya data warisan dari pemerintahan sebelumnya. Mediasi sering digunakan sebagai solusi utama dalam menyelesaikan sengketa lahan, dengan pendekatan kekeluargaan sebagai langkah awal sebelum melibatkan kecamatan atau pihak berwenang lainnya. Dalam beberapa kasus, penyelesaian sengketa dilakukan melalui mekanisme ganti rugi atau mufakat dalam dua hingga tiga kali pertemuan.

Dalam hal regulasi keuangan, pemerintah desa masih menghadapi tantangan dalam penyusunan SOP yang jelas. Saat ini, pengelolaan keuangan masih mengacu pada juknis ADD dan DD tanpa adanya prosedur baku yang dapat dijadikan pedoman dalam pengelolaan dana desa. Selain itu, belum adanya sistem insentif kehadiran bagi perangkat desa juga menjadi salah satu faktor untuk meningkatkan disiplin kerja. Regulasi yang ada saat ini lebih banyak berfokus pada pengaturan anggaran dan tata kelola keuangan desa, seperti pencairan dana, pelaporan keuangan, dan mekanisme pertanggungjawaban. Namun, desa belum memiliki regulasi inisiatif yang lahir dari kebutuhan masyarakat atau bertujuan untuk mengatur urusan tertentu yang bersifat lokal. Misalnya, belum ada peraturan desa (Perdes) yang secara spesifik mengatur tata kelola sumber daya alam desa, mekanisme pemanfaatan aset desa, atau kebijakan desa dalam mengembangkan ekonomi kreatif. Kurangnya regulasi inisiatif ini menyebabkan desa masih sangat bergantung pada aturan dari pemerintah pusat dan kabupaten, tanpa adanya



kebijakan yang secara langsung dapat mengakomodasi kebutuhan spesifik masyarakat desa Kaliorang. Oleh karena itu, diperlukan dorongan untuk menyusun regulasi berbasis kebutuhan lokal agar desa dapat lebih mandiri dalam mengelola berbagai aspek pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Kapasitas Ekstraktif

Perekonomian Desa Kaliorang didominasi oleh sektor pertanian dan perkebunan, dengan komoditas utama berupa pisang dan sawit. Produksi pisang mencapai 20.000 sisir per bulan dari sekitar 100 petani, namun tantangan utama yang dihadapi adalah ketidakstabilan harga dan akses pasar. Pada musim hujan, petani sering mengalami kerugian besar akibat kondisi jalan yang buruk, yang menghambat distribusi hasil panen. Selain itu, terdapat beberapa inisiatif UMKM seperti produksi keripik singkong dan jahe bubuk, namun masih terkendala dalam ketersediaan bahan baku dan akses pasar yang luas.

Pemerintah desa telah berupaya meningkatkan kapasitas ekstraktif dengan mendorong optimalisasi Pantai Marang sebagai destinasi wisata. Kepala Desa telah menjalin kerja sama dengan Dinas Pariwisata untuk mengembangkan infrastruktur wisata di lokasi tersebut. Namun, masih diperlukan strategi pengelolaan yang lebih berkelanjutan agar sektor wisata dapat menjadi sumber pendapatan desa yang stabil. Selain itu, aktivasi pasar event atau bazar desa juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan daya tarik wisata sekaligus mendukung perputaran ekonomi lokal.

Kapasitas Distribusi

Pemerintah Desa Kaliorang telah menunjukkan komitmen dalam mendistribusikan program-program kesejahteraan sosial, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Salah satu program yang telah berjalan adalah pemberian beasiswa bagi siswa SD dan SMP, serta akses beasiswa UNMUL dan INDEXIM bagi warga desa yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Namun, program ini masih menghadapi tantangan besar, yaitu rendahnya minat anak SMA untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Faktor utama yang mempengaruhi hal ini adalah keberadaan perusahaan tambang yang menawarkan peluang kerja dengan gaji yang cukup tinggi, sehingga banyak lulusan SMA yang lebih memilih bekerja daripada melanjutkan pendidikan. Selain itu, dalam



aspek kesehatan, Pemerintah Desa telah mengalokasikan dana untuk program Desa Siaga, yang mencakup penyediaan ambulans, ATK, serta kelas ibu hamil yang bekerja sama dengan puskesmas. Namun, ada kendala dalam distribusi bantuan sosial bagi warga miskin. Data penerima bantuan seperti DTKS tidak selalu akurat karena perubahan data yang tidak diperbarui secara berkala, dan ada kasus di mana bantuan yang diberikan tidak sesuai dengan kondisi real di lapangan. Pemerintah Desa telah mengambil inisiatif untuk menyesuaikan distribusi bantuan berdasarkan observasi langsung, namun sistem administrasi yang lebih akurat dan terintegrasi masih sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa distribusi program benar-benar tepat sasaran.

Selain dalam konteks program, kapasitas distribusi juga berkaitan dengan bagaimana tugas dan tanggung jawab didistribusikan dalam lembaga desa dan masyarakat. Dalam struktur organisasi pemerintahan desa, terjadi perubahan dalam sistem pembagian kerja, terutama setelah Kepala Desa yang baru menjabat. Sebelum kepemimpinan saat ini, tugas administratif lebih banyak terpusat pada Kaur Keuangan, yang menyebabkan beban kerja tidak terdistribusi dengan baik. Saat ini, telah terjadi pembagian tugas yang lebih jelas antara Kaur Keuangan, Kaur Umum, dan perangkat desa lainnya, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang belum memiliki prosedur baku, seperti SOP dalam sistem keuangan desa. Namun, distribusi pekerjaan di tingkat masyarakat masih menghadapi beberapa kendala. Misalnya, dalam pengelolaan Karang Taruna, masih terdapat kecenderungan bahwa inisiatif program lebih banyak berasal dari pemerintah desa, bukan dari pemuda itu sendiri. Selain itu, dalam hal pemberdayaan ekonomi, meskipun BUMDes telah berjalan dalam pengelolaan pupuk dan racun pertanian, belum ada inisiatif distribusi pekerjaan yang mendorong diversifikasi usaha atau penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat desa. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih sistematis dalam mendistribusikan tanggung jawab baik dalam pemerintahan desa maupun dalam upaya memberdayakan masyarakat agar peran dan fungsi setiap aktor dalam pembangunan desa dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Kapasitas Responsif

Kepala Desa Kaliorang dikenal sebagai pemimpin yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini terlihat dari langkah-langkah cepat yang diambil



dalam menangani berbagai isu, seperti pengadaan listrik desa, pengembangan Pantai Marang sebagai objek wisata, dan penyediaan ambulans untuk keperluan darurat. Responsivitas Kepala Desa juga terlihat dalam cara berkomunikasi dengan stakeholder eksternal. Misalnya, dalam upayanya untuk mendapatkan ambulans, ia memanfaatkan momen politik dengan mengundang Wakil Bupati dalam sebuah acara di Pantai Marang, yang akhirnya membuka akses bantuan bagi desa. Strategi komunikasi semacam ini menunjukkan bahwa pemerintah desa cukup adaptif dalam memanfaatkan peluang untuk memperoleh manfaat bagi masyarakatnya.

Namun, dalam beberapa aspek, responsivitas ini masih belum optimal, terutama dalam perencanaan program pembangunan yang bersifat jangka panjang. Masih terdapat beberapa isu penting yang belum mendapat perhatian maksimal, seperti ketersediaan air bersih dan sistem sanitasi yang layak. Misalnya, meskipun desa telah memfasilitasi bantuan material untuk pembangunan sanitasi, banyak warga yang lebih memilih menerima fasilitas dalam kondisi sudah jadi daripada membangun sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan responsif tidak hanya cukup dalam bentuk penyediaan bantuan, tetapi juga harus memperhitungkan aspek kesiapan masyarakat dalam menerima dan mengelola fasilitas yang diberikan.

Kapasitas Jaringan

Pemerintah Desa Kaliorang memiliki jaringan yang cukup luas, baik dengan pemerintah daerah maupun sektor swasta. Kepala Desa telah berhasil menjalin komunikasi dengan dinas-dinas terkait, terutama dalam pengembangan infrastruktur dan sektor pariwisata. Kerja sama dengan Dinas Pariwisata dalam pengembangan Pantai Marang menjadi salah satu contoh bagaimana desa dapat memanfaatkan jejaring eksternal untuk kepentingan pembangunan lokal. Selain itu, keberhasilan desa dalam mengakses program beasiswa dari UNMUL dan perusahaan tambang INDEXIM juga menunjukkan bahwa jejaring yang dibangun dengan lembaga pendidikan dan sektor industri cukup efektif dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap peluang pendidikan dan pekerjaan.

Namun, di sisi lain, belum ada kerja sama yang signifikan dengan sektor swasta dalam pengelolaan ekonomi lokal secara berkelanjutan. Misalnya, meskipun sektor pertanian dan perkebunan menjadi mata pencaharian utama, belum ada inisiatif kolaborasi antara desa dengan perusahaan untuk membuka akses pasar



atau meningkatkan kualitas produk pertanian lokal. Selain itu, keberadaan BUMDes yang mengelola penjualan pupuk dan racun pertanian dengan cukup baik belum diperluas ke pasar yang lebih luas dan potensial. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu memperkuat kapasitas jaringan dengan lebih banyak aktor, terutama dalam pengembangan ekonomi berbasis komunitas agar desa tidak hanya bergantung pada sektor tambang dan program bantuan pemerintah.

Proses Pencalonan dan Pemilihan

Proses pencalonan dan pemilihan Kepala Desa di Kaliorang berjalan dengan baik, dari total 1102 pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), sekitar 70,3% hadir di TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Angka ini cukup tinggi dan mencerminkan tingkat partisipasi politik masyarakat yang baik. Pemilihan ini juga berjalan dengan transparan dan demokratis, di mana kepala desa terpilih mendapatkan 306 suara sah tanpa adanya laporan sengketa atau ketidakpuasan dari kandidat lain.

Keberhasilan pemilihan ini juga menunjukkan bahwa masyarakat masih mempercayai mekanisme demokrasi di tingkat desa. Namun, tantangan yang perlu diperhatikan di masa mendatang adalah bagaimana meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses politik desa secara lebih aktif, tidak hanya dalam pemilihan kepala desa, tetapi juga dalam pengambilan keputusan kebijakan. Masih terdapat kecenderungan bahwa keputusan strategis desa lebih banyak diinisiasi oleh pemerintah desa tanpa partisipasi aktif dari warga dalam proses perencanaan dan pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mendorong budaya politik yang lebih deliberatif, di mana masyarakat tidak hanya berperan sebagai pemilih, tetapi juga sebagai aktor yang aktif dalam mengawal kebijakan desa.

3. Kapasitas Proses dan Birokrasi

Pola Relasi antara Pemerintah Desa dan Warga

Hubungan antara pemerintah desa dan warga di Desa Kaliorang menunjukkan pola yang cukup baik, terutama dalam aspek keterbukaan komunikasi. Kepala Desa memiliki pendekatan yang fleksibel dalam berinteraksi dengan masyarakat, tidak hanya melalui jalur formal di kantor desa tetapi juga melalui pertemuan informal di berbagai kesempatan. Hal ini memungkinkan warga untuk



lebih mudah menyampaikan aspirasi dan keluhan mereka secara langsung kepada Kepala Desa. Pendekatan ini juga terlihat dalam keterlibatan Kepala Desa dalam berbagai forum desa, termasuk musyawarah dusun dan pertemuan RT, yang mencerminkan komitmennya dalam membangun komunikasi dua arah dengan masyarakat.

Namun, meskipun pola komunikasi yang terbuka telah diterapkan, masih terdapat kesenjangan dalam mekanisme partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan. Sejauh ini, usulan warga lebih banyak muncul melalui perwakilan seperti RT, BPD, atau LPM, dan kurang adanya mekanisme di mana warga secara langsung terlibat dalam perumusan kebijakan desa. Dalam beberapa kasus, keputusan desa masih bersifat *top-down*, di mana program-program yang diimplementasikan berasal dari inisiatif pemerintah desa tanpa adanya musyawarah yang lebih inklusif. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk memperkuat mekanisme partisipatif yang memungkinkan warga untuk lebih aktif dalam merancang kebijakan dan program desa, misalnya dengan memperkuat peran forum warga atau musyawarah desa yang lebih demokratis.

Tata Organisasi Pemerintah Desa

Struktur organisasi pemerintah desa telah mengalami perbaikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama dalam hal distribusi tugas dan wewenang antar perangkat desa. Sebelumnya, banyak urusan administratif yang hanya berpusat pada Kaur Keuangan, namun kini sudah ada pembagian kerja yang lebih jelas di antara Kaur Umum, Kasi Layanan, Kasi Kesra, dan Kaur Pemerintahan. Masing-masing memiliki tanggung jawab yang lebih spesifik, seperti pengelolaan inventaris desa oleh Kaur Umum, administrasi keuangan oleh Kaur Keuangan, dan layanan sosial oleh Kasi Kesra.

Namun, masih terdapat tantangan dalam optimalisasi tata organisasi ini. Salah satunya adalah tidak adanya SOP (*Standard Operating Procedure*) yang baku dalam pengelolaan keuangan desa. Saat ini, mekanisme pencairan dana dan laporan pertanggungjawaban masih bergantung pada petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat atau kabupaten. Hal ini menyebabkan kurangnya fleksibilitas dalam merespons kebutuhan desa yang mungkin tidak selalu terakomodasi dalam regulasi standar. Selain itu, ada permasalahan dalam sistem insentif bagi perangkat



desa, di mana tidak ada tunjangan kehadiran sehingga tingkat disiplin dalam menjalankan tugas administratif masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan lebih lanjut dalam tata organisasi, termasuk penyusunan SOP yang lebih jelas dan pemberian insentif yang dapat meningkatkan kinerja perangkat desa.

Membangun Kultur Reformasi Birokrasi

Upaya membangun reformasi birokrasi di Desa Kaliorang masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah pola kerja birokrasi yang masih cenderung mengikuti kebiasaan lama, di mana beberapa kegiatan pemerintahan desa masih dilakukan secara manual dan kurang terdokumentasi dengan baik. Beberapa dokumen administrasi penting, seperti data kependudukan dan catatan pertanahan, masih belum terintegrasi dalam sistem yang lebih modern, sehingga mempersulit proses layanan publik dan pengambilan keputusan berbasis data.

Di sisi lain, reformasi birokrasi juga terhambat oleh budaya kerja yang belum sepenuhnya berbasis profesionalisme. Meskipun Kepala Desa telah menunjukkan kepemimpinan yang progresif, sistem yang berjalan belum memiliki pola kerja yang efisien dan inovatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, sistem koordinasi antar lembaga desa, seperti antara pemerintah desa dengan BPD, LPM, dan RT, masih perlu diperkuat agar tidak hanya berfungsi dalam konteks pengusulan program, tetapi juga dalam proses monitoring dan evaluasi kebijakan desa. Untuk membangun kultur reformasi birokrasi yang lebih baik, pemerintah desa perlu mulai menerapkan sistem kerja yang lebih transparan, efisien, dan berbasis teknologi informasi agar pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal.

Transparansi

Transparansi dalam pemerintahan desa telah mengalami peningkatan cukup signifikan, terutama dalam aspek pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan publik. Kepala Desa telah berusaha untuk memberikan informasi yang jelas terkait dengan kebijakan pembangunan, baik melalui pertemuan formal maupun komunikasi langsung dengan masyarakat. Selain itu, beberapa inisiatif seperti keterbukaan dalam proses pengadaan barang dan proyek infrastruktur telah



diterapkan untuk mencegah adanya praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang.

Namun, meskipun ada upaya untuk meningkatkan transparansi, masih terdapat beberapa tantangan, terutama dalam aspek komunikasi informasi anggaran kepada masyarakat. Misalnya, masih ada persepsi yang salah di kalangan warga terkait mekanisme penggunaan dana desa, di mana beberapa warga menganggap bahwa dana untuk proyek pembangunan sudah termasuk biaya tenaga kerja, padahal dalam banyak kasus, pembangunan infrastruktur desa masih mengandalkan gotong royong. Oleh karena itu, diperlukan sistem komunikasi yang lebih terstruktur, seperti publikasi laporan anggaran secara berkala atau forum diskusi terbuka yang dapat diakses oleh seluruh warga desa.

Penganggaran

Sistem penganggaran di Desa Kaliorang mengikuti prosedur standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan kabupaten. Setiap tahun, desa menyusun APBDes dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, termasuk BPD dan lembaga desa lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir, pengelolaan APBDes juga mengalami perubahan dengan adanya penyesuaian dana tambahan dari transfer kabupaten yang biasanya diajukan melalui APBDes perubahan pada bulan Oktober hingga Desember. Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam anggaran, tetapi juga menimbulkan tantangan dalam implementasi program, terutama pada awal tahun.

Pada bulan-bulan awal, desa masih sering mengalami kesulitan dalam menjalankan program karena keterbatasan anggaran yang belum cair. Hal ini menghambat efektivitas pelaksanaan program, terutama yang bersifat mendesak seperti pembangunan infrastruktur atau program sosial. Padahal, jika proses pelaporan dan pengajuan anggaran dapat dipercepat, maka program desa bisa berjalan lebih awal tanpa menunggu waktu yang terlalu lama. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah dengan menggunakan pedoman penganggaran tahun sebelumnya sebagai dasar dalam menyusun perencanaan awal, sehingga ketika pedoman resmi dari pemerintah pusat atau kabupaten keluar, desa hanya perlu menyesuaikan perubahan-perubahan yang diperlukan. Dengan pendekatan ini, desa



dapat mengurangi keterlambatan dalam realisasi program dan memastikan bahwa layanan publik tetap berjalan efektif sejak awal tahun.

Selain itu, masih banyak kegiatan yang terlaksana di luar rencana anggaran. Misalnya, desa sering kali harus berkontribusi dalam acara atau festival yang diselenggarakan oleh kecamatan tanpa adanya pos anggaran khusus untuk hal tersebut. Selain itu, ada beberapa program yang tidak dapat dianggarkan karena keterbatasan kode rekening dalam sistem keuangan desa, seperti pengadaan bibit cabai yang tidak memiliki kode anggaran tersendiri. Hal ini menunjukkan bahwa sistem penganggaran yang ada masih perlu disesuaikan agar lebih fleksibel dalam mengakomodasi kebutuhan desa tanpa melanggar regulasi yang berlaku. Jika sistem perencanaan dan pengajuan anggaran dapat lebih disiapkan sejak awal dengan strategi yang lebih adaptif, maka desa dapat lebih cepat merespons kebutuhan masyarakat tanpa harus menunggu pencairan yang terlalu lama.

Sistem Informasi Desa

Pengelolaan data dan informasi desa masih menghadapi berbagai kendala teknis. Saat ini, sebagian besar data administrasi desa masih dikelola secara manual, termasuk data kependudukan, BPJS, dan program bantuan sosial. Salah satu masalah yang sering muncul adalah sulitnya mengakses data DTKS karena perubahan sistem yang dilakukan oleh Dinas Sosial tanpa koordinasi yang jelas dengan desa. Selain itu, belum ada sistem informasi terpadu yang dapat diakses oleh seluruh perangkat desa. Misalnya, data kependudukan dan pertanahan masih tersebar di beberapa perangkat desa tanpa ada sistem digital yang memudahkan akses dan pembaruan data secara real-time. Untuk meningkatkan kapasitas ini, diperlukan pengembangan sistem informasi desa yang lebih modern dan terintegrasi agar administrasi desa dapat dikelola secara lebih efisien dan transparan.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Proses pelaporan dan pertanggungjawaban di pemerintahan desa masih berorientasi pada pemenuhan dokumen administrasi, seperti laporan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) yang disusun secara tahunan dan triwulanan. Namun, belum ada mekanisme evaluasi yang lebih mendalam untuk mengukur efektivitas program yang telah dijalankan. Sejauh ini, laporan keuangan dan pertanggungjawaban masih



mengacu pada juknis dari pemerintah pusat, tanpa adanya evaluasi internal yang lebih sistematis. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam sistem monitoring dan evaluasi agar setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat desa.

B. Ekonomi

1. *Komoditas Pisang*

Desa Kaliorang merupakan penghasil utama pisang kepok grecek di Kalimantan Timur dengan luas perkebunan mencapai 227 hektar, yang dikelola secara individu oleh masyarakat. Dusun Golok menjadi wilayah dengan kebun pisang terbesar di desa tersebut. Setiap rumah tangga rata-rata mengelola sekitar 2 hektar kebun dengan pola tanam 6x7 meter antar pohon. Produksi pisang cukup tinggi, dengan 1 hektar kebun menghasilkan sekitar 2,2 ton atau 1.000 sisir pisang setiap bulan. Namun, produksi pisang menghadapi berbagai tantangan, seperti serangan hama dan penyakit, khususnya virus *Fusarium* yang menyerang akar tanaman, serta hama tupai yang dapat mengurangi hasil panen hingga 60%. Untuk mengatasi hal ini, petani menerapkan berbagai metode pengendalian, termasuk menebang dan membakar pohon yang terinfeksi serta penggunaan dolomit dan antivirus.

Pisang kepok grecek dari Kaliorang umumnya dijual dalam bentuk segar melalui tengkulak tanpa perlakuan khusus pasca-panen. Harga jual dari petani berkisar antara Rp6.000 hingga Rp8.500 per sisir, sementara di tingkat pengecer di Samarinda dan Bontang bisa mencapai Rp15.000–Rp20.000 per sisir. Meski distribusi masih terbatas di kota-kota terdekat, potensi pasar lebih luas sebenarnya ada. Namun, kendala biaya transportasi dan persaingan dengan pasokan pisang dari Sulawesi membuat ekspansi ke daerah lain, seperti Jawa, menjadi sulit. Selain itu, pada momen tertentu seperti hari raya, harga pisang cenderung turun karena menurunnya permintaan dari pedagang gorengan, yang merupakan konsumen utama pisang kepok Kaliorang.

Untuk meningkatkan nilai jual, pisang kepok sebenarnya bisa diolah menjadi produk turunan yang lebih tahan lama dan memiliki nilai ekonomis lebih tinggi.



Produk olahan juga dapat mengurangi dampak kelebihan produksi yang menyebabkan harga anjlok. Namun, tantangan utama dalam pengembangan produk olahan adalah biaya produksi yang tinggi, terutama karena tenaga kerja di Kaliorang cukup mahal dan pemasaran produk olahan masih terbatas. Selain itu, produksi harus disesuaikan dengan permintaan pasar agar tetap kompetitif.

Kelompok tani "Merpati" sebenarnya telah dibentuk untuk mendukung petani pisang di Kaliorang, tetapi perannya masih terbatas pada komunikasi dengan pihak eksternal, seperti pengajuan bantuan. Dalam praktiknya, petani lebih memilih menjual hasil panennya secara mandiri, karena koordinasi dalam kelompok seringkali sulit dilakukan, terutama dalam standarisasi harga. Dengan kondisi ini, pengembangan skema distribusi yang lebih terorganisir serta inovasi produk menjadi tantangan utama bagi petani pisang di Kaliorang.

2. *Komoditas Sawit*

Masyarakat desa Kaliorang juga mengelola perkebunan sawit mandiri, saat ini terdapat sekitar 3.783 hektar yang dikelola oleh masyarakat. Rata-rata sawit di Kaliorang merupakan sawit produktif yang berusia sekitar 10 tahunan. Dalam satu bulan, petani sawit dapat melakukan panen 3 hingga 4 kali. Hasil panen biasanya dijual kepada pengepul di Desa Kaliorang. Pada saat musim panen biasanya petani sawit mempekerjakan orang lain.

3. *Perikanan*

Desa Kaliorang, yang terletak di daerah pesisir, memiliki komunitas nelayan tradisional yang terdiri dari empat kelompok dengan total 54 anggota. Sebagian besar nelayan tinggal di RT 01 dan RT 06 dan tidak memiliki lahan perkebunan, sehingga bergantung pada penghasilan dari melaut serta usaha kecil seperti berjualan. Pendapatan nelayan tidak menentu, berkisar antara Rp 2.000.000 hingga Rp 10.000.000 per bulan. Mereka menggunakan metode tangkap ramah lingkungan, seperti pancing, rawai, dan jaring insang, serta menetapkan zonasi berdasarkan alat tangkap yang digunakan. Untuk mendukung keberlanjutan usaha, kelompok nelayan juga mengajukan bantuan peralatan tradisional dari pihak eksternal.



Hasil tangkapan utama nelayan Kaliorang adalah ikan karang, kakap, dan ikan putih, dengan rata-rata hasil 30 kg per sekali melaut dalam kondisi cuaca yang baik. Tantangan utama yang dihadapi nelayan meliputi cuaca buruk saat musim angin selatan dan barat daya, serta masuknya nelayan luar daerah yang menggunakan alat tangkap merusak seperti pukot cincin. Selain itu, aktivitas tambang batu bara di sekitar perairan Kaliorang menyebabkan pencemaran laut, polusi cahaya, dan kerusakan terumbu karang akibat kapal pengangkut yang bersandar sembarangan. Akibatnya, ikan menjauh dari wilayah tangkap, memaksa nelayan untuk melaut lebih jauh dan meningkatkan beban operasional mereka.

Saat ini, ikan hasil tangkapan nelayan dijual dalam bentuk segar di Kecamatan Kaliorang karena jumlahnya masih terbatas. Jika hasil tangkapan melimpah, ikan yang tidak terjual biasanya dikeringkan, meskipun prosesnya memakan waktu dan biaya tinggi. Namun, karena hasil tangkapan semakin menurun, produksi ikan kering pun berkurang. Kelompok nelayan memiliki program iuran kas dan tabungan nelayan yang bisa dicairkan dalam lima tahun. Untuk mengatasi tantangan ke depan, mereka berencana mengajukan permohonan ke desa agar kapal tambang memiliki titik sandar yang teratur demi menjaga ekosistem laut. Selain itu, mereka juga mengajukan bantuan kepada PT. Indexim untuk mendapatkan empat unit kapal induk sebagai terminal distribusi hasil tangkapan nelayan.

4. *Lembaga Ekonomi Desa (BUMDES)*

BUMDes Bumi Etam Sejahtera Desa Kaliorang memperoleh sertifikat badan hukum dari Kemenkumham pada April 2024 dan menerima penyertaan modal awal sebesar Rp 111.000.000 dari desa. Struktur organisasi BUMDes terdiri dari Direktur (Muhammad Ali), Bendahara (Sulfina), serta Sekretaris dan Staf Unit Usaha Penjualan Pupuk dan Racun yang dikelola oleh (Sudri). Salah satu unit usaha utama BUMDes adalah penjualan pupuk dan racun, yang menawarkan berbagai jenis produk seperti pupuk urea, KCL, NPK, dan berbagai jenis racun hama. Produk yang paling diminati adalah pupuk urea, pupuk KCL, serta racun Sigplus dan Samurai. Sistem penjualan dilakukan melalui pre-order (PO) dan pembelian langsung, dengan pemasaran melalui media sosial dan promosi dari mulut ke mulut.



Dalam delapan bulan operasionalnya pada tahun 2024, unit usaha ini berhasil mencapai omzet Rp 291.080.000 dengan laba bersih Rp 14.158.000, yang disetorkan sebagai Pendapatan Asli Desa (PAD). BUMDes juga memberikan gaji bagi pengurusnya, dengan direktur, sekretaris, dan bendahara menerima Rp 1.000.000 per bulan, sementara staf usaha pupuk menerima Rp 500.000 per bulan. Pasar utama usaha ini adalah petani sawit di Kaliorang, yang memiliki lahan sekitar 3.783 hektar dan membutuhkan pupuk tiga kali dalam setahun. Selain petani sawit, petani pisang juga menjadi target pasar meskipun dalam jumlah lebih kecil. Dengan meningkatnya permintaan, peluang ekspansi pasar ke desa sekitar masih terbuka lebar.

BUMDes memiliki keunggulan dalam akses langsung ke distributor PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT), memungkinkan mereka menjual produk dengan harga lebih kompetitif dibandingkan toko lain. Harga pupuk BUMDes lebih murah Rp 25.000 hingga Rp 125.000 dibandingkan kompetitor, yang terdiri dari tujuh toko lokal serta penjual pupuk keliling. Meskipun penjual keliling menawarkan harga lebih murah, petani lebih percaya pada BUMDes karena kasus pupuk palsu dari penjual keliling. Untuk menjaga kelancaran keuangan, BUMDes tidak menerapkan sistem kredit, memastikan perputaran modal tetap stabil dalam menjalankan usaha.

5. *Pokdarwis - Pengelolaan Pantai Marang*

Pengelolaan wisata di Pantai Marang dikerjakan bersama oleh BUMDes, Pokdarwis, dan Karang Taruna. Namun, Pokdarwis merupakan operator utama pengelolaan wisata pantai, yang secara legal juga merupakan salah satu kegiatan (unit) usaha BUMDes. Kontinuitas pengunjung wisata masih menjadi tantangan utama Pantai Marang. Pengunjung ramai hanya pada saat ada event.

6. *UMKM*

Desa Kaliorang memiliki beberapa produk UMKM, seperti keripik pisang Kalbana, gula aren, dan keripik singkong. UMKM Kalbana, yang didirikan pada tahun 2023, merupakan produsen keripik pisang yang terdiri dari 20 anggota. Kelompok ini terbentuk melalui pendampingan MUTIGO dalam program CSR perusahaan tambang batu bara Indexim. Ide produk, teknik pengolahan, branding, hingga



pemasaran, lebih banyak di-*direct* oleh MUTIGO, sementara kelompok hanya berperan sebagai produsen. *Value* produk Kalbana ialah keripik pisang oven yang dipasarkan sebagai camilan sehat untuk segmen kelas menengah ke atas.

Meskipun produk ini memiliki pasar yang spesifik, jaringan pemasarannya masih bergantung pada MUTIGO, yang hingga kini belum memberikan akses langsung ke pasar bagi UMKM Kaliorang (kelompok dampingan). Sejak berdiri, UMKM Kalbana telah menjual sekitar 800 bungkus keripik dengan harga Rp18.000 per bungkus. Diluar MUTIGO, kelompok juga berusaha memasarkan secara mandiri ke toko oleh-oleh di Bontang, galeri UMKM di Samarinda, serta melalui expo dan instansi pemerintah. Namun, permintaan pasar masih rendah, menyebabkan stok produk yang belum terjual menumpuk. Bahkan, produksi saat ini terhenti akibat minimnya permintaan. Upaya lain seperti pembangunan rumah inkubasi produk UMKM oleh Indexim juga tidak membuahkan hasil karena tidak bertemunya antara produk dengan preferensi pasar.

Selain keripik pisang Kalbana, produk gula aren juga menjadi komoditas UMKM di Desa Kaliorang. Berbeda dengan Kalbana, produksi gula aren dilakukan secara mandiri oleh masyarakat tanpa naungan kelompok atau lembaga. Produksi berlangsung secara kontinu karena adanya pengepul yang selalu membeli produk ini. Jika tidak dibeli oleh pengepul, gula aren biasanya dijual ke pasar lolak (SP.4). Arus perdagangan gula aren menunjukkan bahwa produk ini memiliki pasar yang lebih stabil dibandingkan produk UMKM lainnya di desa.

C. Sosial dan Budaya

1. Aspek Keberdayaan Sosial

Penduduk Desa Kaliorang, terdiri dari bermacam suku yang menetap di dalamnya. Mulai dari Kutai, Bugis, Jawa, timur, dan lainnya. Lokasi bermukim cenderung terfragmentasi, sekalipun sebagian sudah mulai membaaur dan hidup Bersama dalam satu area. Pemukiman Desa Kaliorang yang terfragmentasi menurut suku menimbulkan dampak sosial-politik lokal yang signifikan. Kohesi sosial cenderung melemah karena interaksi antar kelompok berkurang; masing-masing komunitas lebih memperkuat ikatan internal (*bonding*) namun minim menjalin



jembatan lintas suku (bridging), sejalan dengan temuan bahwa keberagaman suku berkorelasi dengan turunnya kepercayaan antar warga dan partisipasi komunal.

Jumlah total penduduk Desa Kaliorang sebesar 585 jiwa dengan komposisi 316 penduduk laki-laki dan sebanyak 269 penduduk Perempuan. Kelompok sosial yang sejauh ini ada adalah PKK, Karang Taruna, Pospindu, Posyandu, Posyandu Lansia, Pokdarwis, Lembaga Adat, dan BUMDes, dan kelompok tani. Beberapa data yang diperoleh selama assessment menunjukkan tata Kelola masih menjadi isu krusial pada keberadaan kelompok-kelompok sosial maupun Lembaga Desa yang berada di lingkup Desa Kaliorang. Terdapat persoalan untuk memperkuat tingkat partisipasi warga dalam pelibatan Pembangunan Desa dari aspek sosial ini. Hal ini salah satunya disebabkan oleh pola kerja dan interaksi warga karena alasan geografis (jarak antara satu rumah dengan rumah yang lain jauh). Akses jalan juga menjadi persoalan utama keterlibatan warga secara partisipatif dalam kegiatan-kegiatan Desa. Temuan ini menunjukkan rendahnya spirit kewargaan menjadi tantangan tersendiri, terlihat dari minimnya keterlibatan masyarakat dalam aktivitas sosial serta kurangnya pemahaman mereka terhadap lingkungan sosial di sekitarnya.

Sebagai contoh, misalnya keberadaan Karang Taruna yang stagnan. Stagnasi ini ditandai oleh terbatasnya variasi aktivitas yang tersedia serta mandeknya proses regenerasi. Hampir seluruh kegiatan Karang Taruna masih berada pada sektor olahraga: divisi-divisi yang dibentuk hanya terkait olahraga seperti divisi sepakbola, divisi bulutangkis, divisi futsal, maupun divisi Voli.

“kami punya divisi sepak bola, divisi bulu tangkis, bola voli...” (Ketua Karang taruna...) “Yang datang yaitu-itu saja, iso ditandai siapa saja” (IR, Warga)

Karang Taruna Desa Kaliorang saat ini lebih terfokus pada pengembangan olahraga seperti sepak bola, bulu tangkis, dan bola voli. Namun, partisipasi dalam kegiatan ini cenderung didominasi oleh individu yang sama, mengindikasikan kurangnya variasi dalam keanggotaan dan minat. Ketiadaan program yang mencakup bidang non-olahraga menyebabkan pemuda dengan minat lain tidak memiliki wadah untuk menyalurkan bakat dan potensinya. Hal ini berpotensi



menghambat pengembangan kapasitas mereka dan membatasi kontribusi mereka dalam pembangunan desa. Tidak ada wadah yang bagi pemuda yang berminat pada bukan olahraga. Akibatnya, kapasitas tumbuh dan berkembang para pemuda tidak menemukan ruang dan ini berpotensi menghambat peran mereka dalam membangun desa ke depan.

Sebagai organisasi kepemudaan, Karang Taruna memiliki peran penting dalam memberdayakan pemuda dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Untuk itu, diversifikasi program yang mencakup berbagai bidang seperti seni, budaya, kewirausahaan, dan teknologi menjadi krusial. Dengan menyediakan platform yang beragam, Karang Taruna dapat merangkul lebih banyak pemuda, mendorong partisipasi aktif mereka, dan memaksimalkan potensi kolektif dalam mendukung pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan.

2. *Peran Perempuan dan kelompok marginal*

Peran Perempuan yang terhimpun dalam berbagai Lembaga Desa, justru cenderung lebih hidup. Posyandu, Posyandu lansia, PKK, dan bahkan Pokdarwis, sebagian besar digerakkan oleh Perempuan. Pokdarwis yang mengelola Kawasan Pantai marang, sebagian besar pengurusnya adalah Perempuan. Hal ini menandai bahwa ruang bagi Perempuan terbuka lebar dalam pelibatan mengembangkan Desa Kaliorang. Pada sektor yang lain produksi Kalbana sebagian besar juga merupakan usaha Perempuan dari sektor rumah tangga.

“Ya yang aktif sebagian besar ibu-ibu, disini” (R, Pengelola pokdarwis)

Yang menarik kelompok marginal, terutama lansia dan disabilitas menjadi bagian dari prioritas pemerintah Desa. Pilihan ini menunjukkan keberpihakan pemerintah desa terhadap kelompok marginal, khususnya penyandang disabilitas dan lansia. Keberpihakan ini mencari contoh menarik bagaimana perspektif Pembangunan desa yang inklusif.



“Kami bingung menentukan siapa yang berhak untuk mendapat bansos. Karena itu kami identifikasi warga yang disabilitas untuk diprioritaskan mendapatkan bansos.”

(R, kasi keuangan)

Pernyataan tersebut mencerminkan kebingungan yang kerap dihadapi pemerintah desa dalam proses penentuan penerima bantuan sosial (bansos), terutama karena keterbatasan data dan kriteria objektif yang dapat digunakan secara adil. Di tengah kompleksitas itu, pemerintah Desa Kaliorang menunjukkan keberpihakan etis dan sosial yang penting dengan memprioritaskan penyandang disabilitas sebagai kelompok yang paling rentan. Langkah ini mencerminkan kesadaran bahwa kerentanan bukan hanya soal penghasilan rendah, tetapi juga tentang keterbatasan akses terhadap layanan, peluang kerja, dan keterlibatan sosial yang dialami oleh kelompok disabilitas. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerintah desa mulai bergerak dari pola pembagian bansos yang bersifat administratif menuju pendekatan berbasis keadilan sosial.

Keputusan untuk mengutamakan penyandang disabilitas juga mencerminkan upaya membangun inklusivitas dalam kebijakan desa. Dalam konteks pembangunan yang adil, keberpihakan pada kelompok marginal—termasuk warga dengan disabilitas—bukan hanya soal bantuan material, tetapi juga pengakuan atas eksistensi mereka sebagai bagian yang sah dari warga desa yang berhak mendapat perhatian khusus. Dengan cara ini, pemerintah desa secara perlahan membentuk fondasi penting bagi tata kelola yang lebih manusiawi dan responsif terhadap kebutuhan kelompok yang kerap terabaikan dalam perencanaan pembangunan. Langkah ini dapat menjadi titik awal bagi perumusan kebijakan desa yang lebih inklusif, dengan melibatkan data, pendekatan partisipatif, dan dialog antar warga agar keadilan sosial tidak hanya menjadi slogan, tetapi juga praktik nyata dalam kehidupan desa.



3. Aspek dinamika Sosial

Dinamika Sosial Budaya dan Potensi Ketegangan Komunal di Desa Kaliorang, Kutai Timur

Penelitian terhadap dinamika sosial budaya di Desa Kaliorang mengungkapkan adanya pola pemukiman warga yang terfragmentasi secara etnis. Komunitas Kutai, Jawa, dan Bugis cenderung menempati wilayah yang terpisah, membentuk kantong-kantong pemukiman homogen. Fragmentasi ini merupakan warisan langsung dari kebijakan transmigrasi masa lalu yang dilakukan tanpa perencanaan integrasi sosial yang kuat. Penempatan warga berdasarkan asal daerah menciptakan pola tinggal yang eksklusif dan minim interaksi antarkelompok. Akibatnya, ruang sosial bersama menjadi terbatas, dan relasi antar komunitas berkembang secara terbatas dan cenderung formal.

Polarisasi pemukiman ini tidak hanya menciptakan batas geografis, tetapi juga sekat psikologis yang berdampak pada dinamika sosial warga. Dalam kehidupan sehari-hari, interaksi lintas kelompok memang tetap terjadi, terutama dalam kegiatan ekonomi dan administratif, namun tidak cukup intens untuk membangun kohesi sosial yang kuat. Setiap kelompok etnis masih cenderung memelihara praktik sosial dan budaya secara internal, seperti dalam perayaan adat, pola komunikasi, hingga preferensi pergaulan. Ini memperkuat identitas sub-komunal, namun melemahkan ikatan kolektif sebagai warga desa Kaliorang secara utuh.

Situasi pemukiman terpencar, kutai sendiri, jawa sendiri, bugis sendiri. Ini karena, program transmigrasi yang dulu dilakukan oleh pemerintah pusat yang tidak membaaur. Jadi pisah-pisah berdasarkan asal transmigran. (KR, Tokoh Desa Kaliorang, ...)

Memang pernah muncul kecemburuan antar kelompok, misalnya ada pertanyaan besar tentang kenapa lokasi produksi kalbana hanya ada di tempat tertentu (YG, Perusahaan...)

Dalam konteks tertentu, kondisi ini mulai menimbulkan gesekan sosial dalam bentuk kecemburuan antar kelompok. Salah satu kasus yang mencuat adalah



pertanyaan mengenai lokasi produksi Kalbana—sebuah fasilitas ekonomi penting yang hanya ditempatkan di wilayah tertentu. Meski tidak berkembang menjadi konflik terbuka, ketimpangan persepsi terhadap akses sumber daya ini menciptakan rasa tidak adil di kalangan kelompok lain. Hal ini menunjukkan bahwa fragmentasi sosial yang dibiarkan tanpa fasilitasi ruang bersama akan memunculkan potensi konflik laten yang sewaktu-waktu bisa muncul ke permukaan. Kondisi permukiman yang terfragmentasi meningkatkan potensi prasangka dan konflik sosial, sebagaimana pernah terjadi dalam insiden berbau etnis pada tahun 2014 serta kecemburuan sosial terkait penentuan lokasi produksi Kalbana.

Potensi kecemburuan sosial ini mengindikasikan bahwa relasi antarkelompok masih rentan karena belum dibangun di atas rasa kepemilikan bersama terhadap sumber daya desa. Ketika akses terhadap fasilitas ekonomi atau program pembangunan dirasakan tidak merata atau berpihak pada kelompok tertentu, maka yang muncul bukan solidaritas, melainkan kecurigaan. Dalam masyarakat multietnis seperti Kaliorang, ini adalah sinyal penting bagi perlunya upaya konsolidasi sosial yang tidak hanya simbolik, tapi juga menyentuh aspek-aspek konkret keseharian warga.

Temuan ini menegaskan perlunya pendekatan pembangunan sosial yang lebih sensitif terhadap keberagaman etnis dan sejarah sosial komunitas. Tanpa intervensi sosial yang menciptakan ruang pertemuan dan narasi kolektif, Kaliorang berisiko terjebak dalam “desa dalam desa”—yakni desa yang terdiri dari komunitas-komunitas yang hidup berdampingan, tapi tidak benar-benar bersama. Di sisi lain, jika difasilitasi dengan baik, keberagaman ini justru bisa menjadi fondasi kuat untuk membentuk identitas desa yang inklusif dan berdaya saing secara sosial maupun kultural. Upaya untuk menjaga harmoni sosial pun dilakukan dengan penandatanganan Pakta Kerukunan pada tahun 2025 sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga kerukunan antarwarga.

Persoalan kaum Muda, Balapan motor dan keresahan orang tua

Kegelisahan orang tua di desa kaliorang saat ini adalah terkait trek-trekan motor yang dilakukan oleh anak-anak muda. Pernyataan tentang maraknya balapan motor liar di kalangan anak-anak muda Kaliorang mencerminkan gejala sosial yang



lebih dalam terkait keterbatasan ruang ekspresi dan arah tumbuh kembang remaja desa. Aktivitas tersebut tidak sekadar bentuk kenakalan remaja, tetapi juga menunjukkan ketiadaan saluran positif untuk menyalurkan energi, adrenalin, dan kebutuhan mereka akan pengakuan sosial. Ketika ruang pengembangan bakat, minat, dan kreativitas remaja nyaris tidak tersedia—baik dalam bentuk fasilitas fisik, kegiatan komunitas, maupun bimbingan dari figur dewasa—maka perilaku menyimpang seperti balap motor menjadi semacam “panggung alternatif” bagi mereka untuk mencari identitas dan eksistensi.

“sekarang anak-anak pada balapan motor. Membuat orang tua khawatir, beberapa kali sudah ditegur tapi terus saja terjadi” (TR, Warga Desa)

Fenomena ini juga menunjukkan lemahnya pengawasan sosial dan kerapuhan sistem nilai di lingkungan komunitas. Teguran orang tua atau tokoh masyarakat sering tidak efektif karena tidak dibarengi dengan pendekatan partisipatif dan alternatif kegiatan yang lebih menarik atau bermakna bagi remaja. Persoalan anak muda di Kaliorang tidak hanya terletak pada perilaku permukaan, tetapi juga pada struktur sosial yang belum siap membentuk remaja sebagai subjek pembangunan. Mereka minim ruang aspirasi, kurang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan desa, dan tidak mendapatkan pembinaan yang berkelanjutan. Jika dibiarkan, ketidakpedulian sistemik ini akan memperlebar jurang antara potensi pemuda dan arah pembangunan desa yang inklusif serta berkelanjutan.

Pernikahan dini

Berdasar data kependudukan sebagaimana tertampang dalam Web Desa diperoleh gambaran bahwa jumlah penduduk usia anak (6-17 tahun) sebesar 154 atau 26% dari total penduduk Desa Kaliorang. Anak Perempuan sebanyak 69 orang atau sebesar 11% dari total penduduk Kaliorang, dan Anak laki-laki sebanyak 85 orang atau 15% total penduduk Kaliorang. Dari angka ini menurut penuturan informan assemment ini terdapat rerata 4 kasus pernikahan dini atau rerata 3% pertahun.



“Pernikahan usia dini masih terjadi, ada kadang 2 kasus dalam setahun, 5 kasus pernah ada.” (Bidan Desa)

Kasus-kasus pernikahan dini terjadi karena kesadaran orang tua tentang pola tradisi lama. Kasus lain disebabkan oleh pergaulan anak-anak, sehingga kehamilan diluar nikah terjadi. Orang tua dengan begitu memaksa anak untuk segera dinikahkan.

Kasus-kasus pernikahan dini di Desa Kaliorang masih dipengaruhi oleh pola pikir tradisional orang tua yang memegang teguh norma lama, di mana pernikahan pada usia muda dianggap sebagai hal yang wajar atau bahkan perlu untuk menjaga kehormatan keluarga. Dalam banyak kasus, ketika anak perempuan menjalin hubungan yang dianggap terlalu dekat dengan lawan jenis, orang tua merasa cemas terhadap potensi “aib” sosial yang mungkin timbul dan mendorong pernikahan sebagai solusi cepat. Bahkan, dalam situasi kehamilan di luar nikah, keputusan untuk menikahkan anak sering kali dilakukan secara tergesa-gesa tanpa mempertimbangkan aspek kesiapan mental, emosional, maupun ekonomi anak. Tekanan sosial dari lingkungan sekitar yang masih menjunjung tinggi “penyelesaian melalui pernikahan” semakin memperkuat praktik ini. Padahal, pernikahan dini membawa resiko besar terhadap masa depan anak, mulai dari putus sekolah, kekerasan dalam rumah tangga, hingga kesehatan reproduksi yang rentan. Hal ini menandakan bahwa belum ada transformasi yang kuat dalam kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan masa remaja dan pemahaman atas konsekuensi jangka panjang dari pernikahan dini, sehingga diperlukan pendekatan edukatif dan kultural yang mampu menjangkau baik generasi muda maupun orang tua secara bersamaan.

Facebook dan Interaksi Media Sosial

Dari sisi adaptasi teknologi, desa telah mengaktifkan website desa pada laman <https://kaliorang.desa.id/> yang menginformasikan desa kaliorang secara umum. Namun, tampaknya belum cukup warga yang bisa dan mau mengakses informasi dan layanan ini. Salah satu adaptasi teknologi yang familiar bagi warga desa adalah facebook. Forum Kaliorang di grup Facebook merupakan salah satu



bentuk pemanfaatan teknologi media sosial yang paling aktif digunakan oleh warga desa sebagai ruang pertukaran informasi sehari-hari dan aktivitas jual beli informal. Platform ini berfungsi sebagai pasar digital sekaligus papan pengumuman komunitas, yang memungkinkan warga dari berbagai latar belakang etnis untuk terhubung, berdiskusi, serta melakukan transaksi secara langsung tanpa perantara formal. Dinamika komunikasi yang terbangun di dalamnya menunjukkan bahwa meskipun secara fisik pemukiman warga terfragmentasi, teknologi sosial seperti grup Facebook berhasil menciptakan ruang virtual yang menyatukan dan memperkuat jejaring sosial warga Kaliorang.

4. Aspek Pelestarian Budaya

Minimnya Aktivitas Seni dan Budaya

Penelusuran terhadap aspek kebudayaan di Desa Kaliorang menunjukkan absennya tokoh maupun komunitas yang secara aktif bergerak dalam bidang seni dan budaya. Tidak terdapat inisiatif yang berkelanjutan dalam mengembangkan kesenian, baik yang bersumber dari tradisi lokal maupun bentuk-bentuk seni kontemporer. Meskipun tersedia alat musik modern seperti perangkat band, tidak ada sosok pelatih atau fasilitator yang dapat memfungsikan sarana tersebut menjadi media ekspresi seni yang hidup. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara potensi sarana dan kapasitas sumber daya manusia dalam konteks kebudayaan.

Budaya yang Terpinggirkan dari Ruang Hidup Bersama dan Potensi Tersembunyi

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa Desa Kaliorang saat ini belum memiliki tokoh maupun kelompok yang secara aktif bergiat dalam bidang seni dan budaya. Ketiadaan aktor kultural ini berdampak pada minimnya kegiatan kesenian yang terorganisasi. Meskipun terdapat alat musik modern seperti perangkat band, tidak tersedia pelatih atau fasilitator yang dapat membina dan mengembangkan minat masyarakat, khususnya generasi muda, dalam bidang seni musik. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi yang belum dioptimalkan karena lemahnya infrastruktur kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang seni.

“Sejauh ini tidak ada orang atau tokoh yang bergelut di sektor seni, dan budaya. Artinya orang-orang semacam ini, seminan tidak ada di desa ini” (Kades Kaliorang,)



“Kami punya alat musik modern, band, tetapi tidak ada yang melatih untuk memainkan,”

(Ketua karang taruna,)

Ketiadaan penggerak sektor seni dan budaya ini berdampak pada kekosongan Produk Kesenian dan Ekspresi Kreatif. Belum ditemukan adanya produk kesenian lokal maupun kerajinan kreatif khas desa. Ini menandakan bahwa ruang ekspresi budaya dalam bentuk artefak seni atau produk ekonomi kreatif masih sangat terbatas. Ketiadaan ini bukan hanya soal minimnya produksi, tetapi juga mencerminkan belum adanya ekosistem budaya yang mendukung tumbuhnya ekspresi kolektif berbasis seni. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pelatihan, tidak adanya pasar, atau tidak adanya pengakuan terhadap nilai budaya lokal sebagai aset.

“Sejauh ini tidak ada produk kesenian atau kerajinan kreatif di sini. Ekspresi kebudayaan tidak nampak pada ruang hidup Bersama baik berupa ekspresi berupa kerajinan, maupun ekspresi gerak. Yang sejauh ini paling kelihatan ya ketika upacara pernikahan. Tiap keluarga memakai pakaian dari adat masing-masing.”

(KR, tokoh Masyarakat Desa kaliorang,..)

Bentuk praktik seni secara umum yang nampak adalah tari yang diajarkan pada anak-anak, tetapi itupun tidak banyak yang mempelajarinya. Menurut penuturan salah satu tokoh masyarakat kutai hal ini karena absennya pelatih yang asli dari kutai. “mungkin perlu mendatangkan pelatih aslinya dari kutai, agar seni tradisi ini bisa ditularkan kepada anak-anak muda di kaliorang” tuturnya.

Satu-satunya ekspresi budaya yang masih terlihat hidup adalah dalam konteks upacara pernikahan. Dalam momen tersebut, setiap keluarga menunjukkan identitas adat mereka melalui pakaian tradisional. Meskipun ekspresi ini bersifat individual dan hanya muncul dalam momentum seremonial tertentu, hal ini menunjukkan bahwa memori budaya dan identitas adat masih bertahan secara personal dalam ruang privat masyarakat. Namun demikian, ekspresi ini belum



berkembang menjadi representasi budaya kolektif yang dapat diakses atau dinikmati oleh publik.

Belum terlihat dukungan pemerintah Desa untuk aktivasi aspek seni dan budaya

Temuan penting lainnya adalah absennya budaya dalam ruang hidup bersama. Tidak ditemukan aktivitas budaya dalam bentuk pertunjukan seni, ritual komunal, atau ruang publik yang mengakomodasi ekspresi kebudayaan. Ini menunjukkan bahwa budaya belum menjadi bagian dari dinamika sosial sehari-hari. Ruang sosial masyarakat tampak lebih fungsional dan ekonomis ketimbang simbolik dan ekspresif. Padahal, dalam banyak masyarakat lokal, budaya seringkali menjadi pengikat sosial dan peneguh identitas komunal.

Identitas kebudayaan desa Kaliorang tidak dibentuk dari satu tradisi tunggal. Komposisi penduduk yang berasal dari berbagai latar etnis seperti Bugis, Jawa, Kutai, dan lainnya justru menciptakan kondisi kultural yang plural namun belum terorganisasi menjadi sebuah narasi identitas bersama. Alih-alih menjadi kekayaan yang dirayakan bersama, keberagaman tersebut tampak belum bertransformasi menjadi suatu kekuatan budaya desa yang khas. Hal ini menyebabkan “identitas budaya Kaliorang” menjadi sesuatu yang kabur atau belum menemukan bentuk yang konkret.

“Kami tidak memiliki dokumen sejarah desa secara tertulis, sehingga perayaan-perayaan kami lakukan bersama desa-desa yang lain.” (TK, Masyarakat kaliorang...)

“Sebenarnya kaliorang memiliki sekian banyak etnis yang menetap di desa ini, tetapi ini belum terlihat budaya dari masing-masing suku, tidak nampak. Ada semacam kesepakatan silakan tampilan budaya masing-masing tapi jangan menonjol (HR, Tokoh Masyarakat).”

Temuan ini menunjukkan adanya tantangan besar dalam penguatan identitas budaya desa. Tidak hanya pada aspek regenerasi pelaku seni dan budaya, tetapi juga pada kelembagaan, pengarsipan, dan ruang ekspresi budaya itu sendiri. Tanpa upaya afirmatif yang sistematis, ekspresi kebudayaan di Kaliorang berisiko



meredup dan kehilangan fungsinya sebagai perekat sosial. Sebaliknya, jika potensi keberagaman ini dapat difasilitasi, Kaliorang memiliki peluang untuk membentuk identitas budaya yang inklusif dan berakar dari multi etnisitas yang dimilikinya.

Dalam kehidupan sehari-hari bahasa yang digunakan sebagian besar bahasa lokal dari masing-masing penuturnya. Warga yang berasal dari kutai menggunakan bahasa melayu, dari bugis menggunakan bahasa bugis, suku jawa menggunakan bahasa jawa. Pada kegiatan-kegiatan formal desa, penggunaan bahasa dengan menggunakan bahasa Indonesia. Termasuk komunikasi antar suku dengan menggunakan bahasa Indonesia pula. Bahasa lokal yang banyak digunakan adalah bahasa bugis, karena jumlah warga dari suku bugis mendominasi desa ini dibandingkan warga dari suku yang lain.

Indonesia kecil Pak kita sini Pak, sangat beragam kemudian suku aslinya bergerak ke mana gabung jadi apa jadi tadi ada terang dari luar ada terang lokal jadinya Oke jadi dirangkul semua oleh pemerintah (HR, Tokoh Masyarakat...)

Desa Kaliorang sering digambarkan oleh warganya sebagai "Indonesia kecil" karena keberagamannya yang tinggi, dengan penduduk yang berasal dari berbagai suku, termasuk suku asli yang kini telah membaaur dalam dinamika sosial yang lebih luas. Proses percampuran ini terjadi seiring masuknya pendatang dari berbagai daerah, yang membawa serta "terang dari luar", yakni pengetahuan, budaya, dan semangat baru, yang kemudian berpadu dengan "terang lokal" atau kearifan dan identitas setempat. Pemerintah desa dinilai cukup berhasil merangkul keragaman ini melalui pendekatan inklusif, menciptakan rasa diterima bagi semua kelompok. Meskipun belum sepenuhnya membentuk identitas budaya kolektif yang utuh, proses integrasi sosial ini telah menjadi pondasi penting bagi terbentuknya kohesi sosial di tengah pluralitas etnis dan budaya yang hidup di Kaliorang.

Kondisi ini justru membuka peluang untuk melakukan revitalisasi budaya. Identitas adat yang masih hidup dalam keluarga, meskipun terbatas pada pakaian saat pernikahan, dapat menjadi titik masuk untuk menggali lebih jauh narasi, nilai, dan ekspresi budaya yang lebih luas. Dengan pendekatan partisipatif, masyarakat dapat dilibatkan dalam proses penggalian kembali ingatan budaya, penciptaan



ruang seni bersama, serta pengembangan produk kreatif berbasis nilai lokal. Dukungan kelembagaan dan fasilitasi sumber daya akan menjadi kunci untuk mendorong munculnya aktor budaya lokal yang mampu menghidupkan kembali seni dan budaya sebagai bagian dari kehidupan desa.

Belum terlihat dukungan pemerintah Desa untuk aktivasi aspek seni dan budaya

Minimnya ekspresi seni dan budaya di Kaliorang tidak selalu berarti ketiadaan potensi. Justru, kondisi ini memperlihatkan adanya ruang kosong budaya yang bisa diisi. Tantangan utama terlihat pada tiga aspek: (1) ketiadaan pelaku seni dan budaya lokal, (2) belum adanya ruang ekspresi kolektif, dan (3) lemahnya artikulasi identitas budaya bersama akibat keragaman etnis yang belum difasilitasi secara strategis.

“Sejauh ini Pak Kades, mungkin masih fokus di Infrastruktur ya. Jadi belum menaruh perhatian pada sisi budaya. Kita maklumi, ini baru dua tahun ia menjabat,” (HR,

Tokoh Masyarakat...)

Namun di balik tantangan ini, terdapat peluang besar, yakni keragaman suku dan budaya yang jika dikemas dengan pendekatan lintas-etnis berbasis partisipasi warga, bisa menjadi fondasi bagi terbentuknya identitas budaya Kaliorang yang khas. Ketiadaan warisan seni yang dominan juga bisa dibaca sebagai “halaman kosong” yang terbuka untuk diisi dengan bentuk-bentuk ekspresi baru yang sesuai konteks zaman, seperti seni digital, seni pertunjukan kolaboratif, atau festival budaya komunitas.

5. Aspek Pendidikan dan Ketenagakerjaan

Kualitas pendidikan: kualitas literasi dan numerasi yang masih rendah.

Desa Kaliorang menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi perkembangan sumber daya manusia dan kesempatan kerja bagi warganya. Secara umum, tingkat pendidikan masyarakat berada pada jenjang SMP hingga SMA. Fasilitas pendidikan tersedia mulai dari TK, SD, dan SMP.

Salah satu kendala sosial yang dihadapi di Desa Kaliorang adalah tidak terakomodasinya sekitar 10% anak usia Taman Kanak-Kanak (TK) ke dalam sistem



pendidikan formal akibat ketiadaan data, akanta anak. Anak-anak ini umumnya berasal dari keluarga pendatang yang baru pindah ke Kaliorang dan belum memiliki dokumen kependudukan resmi. Padahal, terdapat kesepakatan antara pemerintah desa dan kepala sekolah SD setempat bahwa kelulusan TK merupakan prasyarat untuk bisa masuk Sekolah Dasar. Kondisi ini menciptakan dilema serius: di satu sisi ada upaya menertibkan jalur pendidikan dasar yang sistematis, namun di sisi lain terdapat hambatan administratif yang menyebabkan eksklusi terhadap kelompok rentan. Ini menyoroti pentingnya intervensi administratif dan kebijakan transisi yang lebih fleksibel, agar semangat membangun kualitas pendidikan anak tidak tersandung oleh persoalan legalitas identitas keluarga.

“kami punya kendala, ada 10% anak usia TK yang tidak masuk TK, karena tidak memiliki kartu anak. Mereka umumnya orang tua yang pindah ke Kaliorang dan belum memiliki identitas. Padahal kami punya kesepakatan dengan Kepala sekolah SD, bahwa untuk masuk SD harus lulus TK dulu,” (Kepala Paud Desa kaliorang...)

Perbedaan perkembangan antara anak yang mengikuti pendidikan PAUD dengan yang tidak sangat terasa di Desa Kaliorang, terutama saat memasuki jenjang pendidikan berikutnya. Anak-anak yang telah melalui masa PAUD menunjukkan kesiapan belajar yang jauh lebih baik—mereka sudah mengenal konsep dasar seperti ucapan salam, bisa berinteraksi dengan guru dan teman sebaya, serta memahami struktur kegiatan kelas. Sebaliknya, anak-anak yang tidak mengikuti PAUD cenderung tampak bingung, pasif, dan butuh waktu lebih lama untuk beradaptasi. Hal ini menunjukkan bahwa PAUD bukan sekadar tempat bermain, tetapi menjadi pondasi penting dalam pembentukan kesiapan sosial dan kognitif anak.

Kondisi ini menjadi bukti nyata bahwa pendidikan usia dini memiliki dampak langsung terhadap kesiapan belajar anak di tingkat selanjutnya. Guru-guru di tingkat SD pun menjadikan pengalaman PAUD sebagai indikator penting dalam menilai kesiapan anak mengikuti kegiatan belajar-mengajar. Oleh karena itu, selain menyelesaikan persoalan administratif seperti ketiadaan KK, perlu ada penguatan peran PAUD sebagai bagian integral dari sistem pendidikan desa, termasuk



dukungan terhadap akses, tenaga pendidik, dan keterlibatan keluarga dalam memastikan anak-anak tidak melewatkan fase pendidikan yang sangat krusial ini.

. Permasalahan serius yang dihadapi dalam sistem administrasi pendidikan di Desa Kaliorang adalah ketiadaan data kependudukan anak-anak dari keluarga pendatang, khususnya mereka yang sebelumnya tinggal di Malaysia sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW). Banyak dari anak-anak ini tidak memiliki dokumen dasar seperti akta kelahiran atau Kartu Keluarga, yang merupakan syarat utama untuk dimasukkan ke dalam sistem pendataan pendidikan nasional (DAPODIK). Tanpa akta, pihak sekolah maupun pemerintah desa kesulitan untuk memproses hak-hak pendidikan anak secara resmi. Situasi ini diperparah oleh fakta bahwa sebagian besar orang tua anak menikah secara siri saat di Malaysia dan tidak memiliki dokumen legal dari daerah asalnya di Indonesia, sehingga tidak ada surat pindah yang bisa dijadikan dasar untuk pencatatan ulang di Kaliorang.

Sebagian besar ketiadaan data ini karena orang tua yang dari Malaysia (TKW), pendatang, dan kami sangat kesusahan dengan data yang misalnya tidak ada akte. Kadang ini yang paling utama Akta, pegangan kita membuat dapodik, rata-rata pendatang sampai umur 6 tahun tidak punya data, kami harus bagaimana untuk mengakali itu tidak bisa. Dari desa sudah koordinasi dengan desa, tidak bisa apa-apa kalau tidak ada surat pindah. Dan rata-rata dari pendatang malaysia nikah siri disana, tidak ada data dari kampung asal. Merantau ke malaysia trus pindah kesini.

(Kepala Paud Desa kaliorang)

Upaya koordinasi antara pihak desa dan sekolah sudah dilakukan, namun terbentur pada prosedur formal yang menuntut dokumen sah sebagai dasar legalitas. Kondisi ini menciptakan kebuntuan administratif, karena meskipun secara faktual anak-anak tersebut tinggal dan besar di Kaliorang, secara hukum mereka dianggap “tidak terdata.” Hal ini menciptakan lapisan kerentanan baru dalam akses pendidikan, karena anak-anak ini terancam tidak dapat masuk sekolah hanya karena terhambat oleh proses birokrasi yang tidak fleksibel terhadap situasi mobilitas



migran. Maka dibutuhkan solusi lintas sektor, termasuk kerja sama antara Dinas Kependudukan, Dinas Pendidikan, dan lembaga perlindungan anak, untuk merancang mekanisme transisi administratif yang memungkinkan anak-anak dari latar belakang migrasi informal tetap mendapatkan hak dasarnya untuk belajar.

Kendalanya di lingkungan tk saya sih, ada anak yang autis, orang tua tidak bisa menerima, tidak pernah saya sampaikan, ada 2 anak autis, bahasa dokter. Bahasa kami mungkin terlambat saja, umur 6 tahun belum bisa bicara.

(Kepala Paud Desa kaliorang)

Di lingkungan TK di Desa Kaliorang, salah satu tantangan yang muncul adalah keberadaan anak-anak dengan kebutuhan khusus, khususnya yang menunjukkan gejala autisme. Terdapat setidaknya dua anak yang menurut keterangan medis mengarah pada spektrum autistik, namun dalam pemahaman lokal lebih sering disebut sebagai "terlambat bicara" atau "lambat tumbuh." Guru-guru di lapangan menghadapi dilema karena orang tua anak-anak tersebut belum sepenuhnya bisa menerima kondisi anak mereka. Informasi tentang diagnosis atau kondisi khusus tidak pernah disampaikan secara terbuka oleh guru kepada orang tua, karena kekhawatiran akan munculnya penolakan atau reaksi emosional. Ini mencerminkan adanya kesenjangan pemahaman antara istilah medis dan bahasa keseharian masyarakat, serta minimnya dukungan sistemik terhadap pendidikan inklusif di tingkat desa.

Selain persoalan kebutuhan khusus di usia dini, Kaliorang juga menghadapi kenyataan adanya anak-anak yang putus sekolah di jenjang SD maupun SMP. Fenomena ini menambah kompleksitas masalah pendidikan, karena tidak hanya mencakup akses dan fasilitas, tetapi juga keberlanjutan dan dukungan sosial terhadap anak-anak usia sekolah. Faktor ekonomi, mobilitas keluarga, dan kurangnya pendampingan belajar diduga menjadi penyebab utama anak-anak meninggalkan bangku sekolah. Dalam konteks ini, pendidikan di Kaliorang tidak hanya ditantang oleh keterbatasan infrastruktur atau administratif, tetapi juga oleh faktor kultural dan sosial yang membutuhkan pendekatan lintas sektor—yang



menyatukan guru, keluarga, pemerintah desa, dan lembaga pendukung lainnya dalam satu visi: memastikan setiap anak, termasuk yang berkebutuhan khusus, dapat belajar dan tumbuh tanpa tertinggal.

Tantangan lain yang dihadapi adalah masih adanya kasus anak putus sekolah, terutama pada jenjang SD dan SMP. Sebagian dari mereka langsung masuk ke dunia kerja, khususnya di sektor perkebunan kelapa sawit, sehingga peluang untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi semakin kecil. Hal ini menunjukkan perlunya intervensi dalam bentuk akses pendidikan yang lebih luas dan program pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri serta masa depan generasi muda di Kaliorang.

Tantangan serius yang masih dihadapi Desa Kaliorang adalah tingginya angka putus sekolah, khususnya pada jenjang SD dan SMP. Anak-anak yang seharusnya masih berada di bangku pendidikan justru memilih untuk langsung masuk ke dunia kerja, terutama di sektor perkebunan kelapa sawit yang mudah diakses dan menjanjikan pendapatan cepat. Bagi sebagian keluarga, kondisi ekonomi menjadi alasan utama yang mendorong anak untuk bekerja, bukan melanjutkan sekolah. Dalam konteks ini, pendidikan seringkali dipandang sebagai “kemewahan” yang tertunda, sementara kebutuhan rumah tangga bersifat mendesak dan mendikte keputusan jangka pendek.

Namun dampak jangka panjang dari keputusan ini sangat signifikan. Ketika anak-anak berhenti sekolah terlalu dini dan tidak memiliki keterampilan kerja formal, maka mereka cenderung terjebak dalam pekerjaan berupah rendah dan minim perlindungan hukum. Sektor sawit memang menjadi daya tarik ekonomi, tetapi tidak menjamin peningkatan kesejahteraan jika tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Tanpa pendidikan dan keterampilan yang memadai, generasi muda Kaliorang akan terus menjadi tenaga kerja marginal di kampung sendiri, tanpa peluang naik kelas sosial atau masuk ke sektor industri yang lebih mapan dan berpenghasilan layak.

Untuk itu, diperlukan intervensi terpadu yang tidak hanya berfokus pada akses pendidikan formal, tetapi juga mencakup program pelatihan vokasional, beasiswa untuk anak-anak dari keluarga rentan, serta kampanye penyadaran kepada orang tua tentang pentingnya pendidikan jangka panjang. Pendekatan ini harus



berbasis realitas lokal: bahwa anak-anak akan tergoda bekerja karena kebutuhan ekonomi, maka pendidikan harus mampu menawarkan alternatif yang nyata dan bermakna. Dengan membangun jembatan antara pendidikan dan peluang kerja yang bermartabat, Kaliorang dapat menciptakan ekosistem yang mendukung generasi muda untuk tidak hanya bekerja, tetapi juga berkembang dan berdaya di tanah mereka sendiri.

Relevansi Pendidikan dengan Kebutuhan Lokal: Kesenjangan Kurikulum SMK dengan Kebutuhan Perusahaan, dan kematangan personal calon pekerja.

Keberadaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di wilayah SP 4, meskipun memberi akses pendidikan menengah bagi siswa-siswi dari Kaliorang dan sekitarnya, ternyata belum mampu menjawab kebutuhan keterampilan yang relevan dengan dunia industri lokal, khususnya sektor pertambangan. SMK yang ada masih bersifat umum dan belum memiliki jurusan-jurusan spesifik yang selaras dengan kompetensi kerja yang dibutuhkan perusahaan, seperti teknik alat berat, operator tambang, atau manajemen keselamatan kerja. Akibatnya, meskipun siswa lulus dari jenjang kejuruan, mereka tetap tidak kompetitif di pasar kerja karena keterampilan yang dimiliki tidak kompatibel dengan kebutuhan industri di sekitar mereka.

Jarang anak-anak yang membaca secara lancar. Pembinaan perusahaan di SMK, kita nemu anak yang ga bisa baca. Jika tidak bisa baca bagaimana mau ikut ujian. Terpertama adalah psikotes. Kemampuan membaca dan perhitungannya no pasti tidak diterima.

(YG, Perusahaan)

Rendahnya Kemampuan Literasi Dasar sebagai Penghambat Akses Kerja di Kaliorang. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak siswa SMK di wilayah Kaliorang yang belum memiliki kemampuan membaca dan berhitung yang memadai. Dalam kegiatan pembinaan perusahaan yang dilakukan di sekolah, bahkan ditemukan kasus siswa yang tidak bisa membaca secara lancar. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena menjadi hambatan mendasar dalam mengikuti proses seleksi kerja, di mana tahap awal seperti psikotes dan ujian tertulis sudah



mensyaratkan kemampuan literasi dan numerasi dasar. Ketika kemampuan dasar ini tidak terpenuhi, maka secara otomatis peluang siswa untuk diterima bekerja di perusahaan, terutama yang memiliki standar ketat seperti perusahaan tambang, menjadi sangat kecil.

Selain itu, tidak adanya sekolah SMA/SMK yang terhubung dengan kebutuhan industri menjadi kendala besar dalam penyerapan tenaga kerja lokal ke perusahaan. Dari sekitar 1.000 pendaftar, hanya 10% yang berhasil diterima bekerja, dengan sebagian besar gagal dalam tahapan psikotes dan kurangnya kematangan personal. Kondisi ini diperburuk oleh rendahnya kapasitas literasi, numerasi, dan pengembangan karakter, karena minimnya aktivitas pendidikan tambahan di luar jam sekolah. Saat ini, satu-satunya kegiatan pendidikan nonformal yang tersedia adalah pengajian keagamaan atau TPA, sementara aktivitas yang dapat mendukung keterampilan lain masih sangat terbatas.

Di Desa Kaliorang dan sekitarnya, ketidakhadiran sekolah menengah atas atau kejuruan (SMA/SMK) yang secara khusus dirancang untuk menyambung dengan kebutuhan dunia industri menjadi faktor utama rendahnya tingkat serapan tenaga kerja lokal oleh perusahaan tambang. Dari sekitar 1000 pendaftar warga setempat, hanya sekitar 10% yang berhasil lolos dalam proses rekrutmen. Mayoritas gagal bukan karena kurangnya semangat atau potensi teknis semata, tetapi lebih pada aspek psikotes dan kematangan personal—seperti kemampuan mengelola emosi, disiplin kerja, komunikasi, dan tanggung jawab personal. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan akses kerja di Kaliorang bukan hanya soal skill gap, tetapi juga soft skill gap yang belum disentuh oleh sistem pendidikan maupun proses pendewasaan sosial di tingkat komunitas.

Banyak sekali yang gugur di psikotes. Artinya ini menunjukkan kematangan warga untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan Perusahaan, (YG, Perusahaan...)

Kegagalan besar-besaran dalam tahapan psikotes menunjukkan bahwa banyak warga, terutama generasi muda, belum memiliki kesiapan mental dan kedewasaan personal yang sesuai dengan standar industri modern. Ini bukan sepenuhnya kesalahan individu, tetapi gejala dari sistem pendidikan dan lingkungan



sosial yang belum membekali mereka dengan life skills yang memadai. Tanpa pendidikan yang menyentuh aspek karakter dan etos kerja, lulusan sekolah cenderung hanya membawa pengetahuan dasar, bukan kesiapan hidup yang utuh. Apalagi dalam konteks desa yang jauh dari paparan dunia profesional, kesiapan mental ini menjadi kendala nyata.

Karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dalam mempersiapkan warga Kaliorang menghadapi dunia kerja, khususnya industri pertambangan yang memiliki standar ketat dalam seleksi personal. Bukan hanya membuka akses ke pendidikan kejuruan yang relevan dengan kebutuhan industri, tetapi juga membangun ekosistem pelatihan yang memperkuat daya tahan psikologis, disiplin, etika kerja, serta kemampuan beradaptasi. Pemerintah desa, sekolah, lembaga pelatihan, dan perusahaan perlu bersinergi menciptakan program transisi dari sekolah ke dunia kerja yang realistis dan berbasis konteks lokal. Tanpa itu, warga akan terus tertinggal di kampung sendiri, menjadi penonton di tengah lalu lalang ekonomi besar yang berlangsung di sekitarnya.

Absennya kolaborasi pemerintah-keluarga-Warga-dan sekolah

Pemerintah Desa Kaliorang telah mengambil langkah proaktif dalam mendukung pendidikan usia dini dengan membangun gedung PAUD sebagai sarana belajar bagi anak-anak prasekolah. Selain penyediaan infrastruktur, desa juga mengalokasikan anggaran untuk membiayai honor para pengajar PAUD, menunjukkan adanya komitmen nyata terhadap penguatan fondasi pendidikan dasar di tingkat desa. Kebijakan ini mencerminkan kesadaran pemerintah desa akan pentingnya fase pendidikan awal sebagai penentu kualitas belajar anak di jenjang berikutnya. Dukungan ini juga menjadi wujud intervensi negara di level lokal yang tidak hanya memfasilitasi akses, tetapi juga menjamin keberlanjutan layanan pendidikan anak usia dini secara sistematis dan berkelanjutan.

Situasi anak-anak di Desa Kaliorang memperlihatkan tantangan signifikan dalam pengembangan literasi dan numerasi. Sekolah-sekolah setempat menghadapi keterbatasan fasilitas dan sumber daya, sementara lingkungan rumah dan sosial kurang memberikan dukungan yang memadai. Orang tua cenderung kurang peduli terhadap pendidikan anak-anak mereka, baik dari segi perhatian maupun investasi



finansial. Akibatnya, tidak tersedia wadah yang efektif bagi anak-anak untuk mengembangkan kemampuan dasar mereka, dengan satu-satunya lembaga yang ada, seperti TPA, lebih fokus pada pengajaran agama tanpa program bimbingan belajar tambahan.

“ruang kami hanya di sekolah, diluar sekolah kami tidak bisa mengawasi. Tapi kadang kami mendatangi keluarga untuk memastikan anak-anak untuk tetap belajar, tidak bekerja di lahan sawit keluarga,”
(Waka SMP Kaliorang....)

Di luar lingkungan sekolah, anak-anak dan remaja di Kaliorang menghadapi minimnya pengawasan dan kurangnya aktivitas yang mendukung pengembangan pribadi. Tidak adanya ruang atau fasilitas untuk menyalurkan bakat dan minat mereka menyebabkan meningkatnya kenakalan remaja dan perilaku menyimpang. Ketiadaan program ekstrakurikuler atau komunitas yang mendukung pengembangan keterampilan non-akademik semakin memperparah situasi ini, membuat anak-anak rentan terhadap pengaruh negatif dan kehilangan arah dalam masa pertumbuhan mereka.

Analisis terhadap kondisi ini menunjukkan absennya kolaborasi efektif antara tiga pilar utama pendidikan: sekolah, keluarga, dan masyarakat. Sekolah berjuang sendirian dengan keterbatasan yang ada, tanpa dukungan signifikan dari keluarga yang kurang memahami pentingnya peran mereka dalam pendidikan anak. Masyarakat, termasuk pemerintah desa, belum menyediakan fasilitas atau program yang mendukung pengembangan literasi, numerasi, dan keterampilan sosial anak-anak. Tanpa sinergi antara ketiga komponen ini, upaya peningkatan kualitas pendidikan dan pengembangan diri anak-anak di Kaliorang akan terus menghadapi hambatan yang sulit diatasi.

Bekerja di tambang sebagai cita-cita anak-anak muda

Desa Kaliorang merupakan desa lingkaran tambang Batubara, semen, dan perusahaan-perusahaan sawit. Ketiga sektor ini menjadi tumpuan besar bagi warga dan anak-anak muda untuk bekerja setelah selesai sekolah. Temuan penelitian



menunjukkan bahwa, ketiga sektor ini menjadi cita-cita hampir semua anak muda di sekitar tambang, khususnya desa kaliorang untuk memperoleh penghasilan. Bagi pemuda laki-laki bekerja di tambang sesuatu yang wah, meskipun sebagian besar berada pada tenaga kasar. Sementara di pemuda putri, sektor yang vendor-vender Perusahaan penyedia catering untuk karyawan Perusahaan.

“Semua anak-anak muda pengennya bekerja di tambang. Gajinya gede. Sebagian mengelola kebun sawit keluarga, atau buruh petik dan angkat panen, sehari rata-rata dapat 250-300 ribu”
(Ketua Karang Taruna Kaliorang)

Pola 6 atau 7 minggu kerja, dua minggu libur menjadi rutinitas pekerja-pekerja tambang di Desa kaliorang. Beberapa kelompok pemuda memilih bekerja freelance, bongkar muat di kapal tongkang. Waktu yang digunakan di laut biasanya 2 minggu, sisanya untuk merawat kebun sawit. Pola ini dilakukan hampir semua warga yang bekerja di sektor tambang, maupun sawit. Di Hari libur sebagian besar memilih tinggal di rumah. Hal ini tampak seperti pekerja-pekerja di kota-kota besar yang memanfaatkan hari libur kerja untuk berdiam diri dirumah.

6. Aspek Lingkungan dan Kesehatan

Akses layanan Kesehatan dan status Kesehatan Masyarakat

Status kesehatan masyarakat di Desa Kaliorang menunjukkan tantangan yang cukup kompleks, terutama terkait penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes melitus yang dilaporkan sebagai kondisi paling dominan di kalangan warga. Selain itu, penyakit menular seperti Tuberkulosis (TB) masih menjadi perhatian, dengan sejumlah warga yang masih dalam masa pengobatan meski beberapa kasus telah dinyatakan sembuh. Situasi ini menandakan adanya beban ganda penyakit yang dihadapi masyarakat: di satu sisi penyakit kronis yang berkaitan dengan gaya hidup, dan di sisi lain penyakit menular yang berkaitan dengan sanitasi dan kondisi lingkungan. Hal ini memerlukan pendekatan kesehatan masyarakat yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan.



“Hipertensi banyak, Diabetes melitus juga banyak, ini yang paling dominan. TB sudah jangkauan ada yang masih dalam pengobatan dan yang sudah sembuh. Tahun lalu ada KLB DBD di dusun satu, tapi alhamdulillah sudah teratasi” (Bidan Desa)

Tantangan besar lainnya adalah munculnya Kejadian Luar Biasa (KLB) Demam Berdarah Dengue (DBD) di Dusun 1, yang menandakan bahwa masih terdapat celah dalam sistem kewaspadaan dini dan pengendalian vektor penyakit. Ini menjadi alarm bagi pentingnya penguatan surveilans kesehatan lingkungan serta edukasi warga dalam menjaga kebersihan dan mencegah genangan air yang menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk.

Aspek lain yang memperparah krisis kesehatan lingkungan di Kaliorang adalah paparan debu batu bara dari aktivitas industri di sekitar wilayah desa. Debu ini disebut berdampak langsung terhadap kualitas udara dan sistem pernapasan warga, terutama ketika musim kemarau tiba. Laporan dari warga menyebutkan bahwa debu hitam sangat mudah terlihat menempel di permukaan rumah, bahkan di fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas pembantu (pustu), yang mengindikasikan bahwa paparan berlangsung dalam intensitas tinggi dan terus-menerus. Gangguan seperti batuk dan pilek menjadi keluhan umum, terutama pada anak-anak dan lansia. Hal ini menunjukkan bahwa Desa Kaliorang menghadapi beban ganda: masalah lingkungan domestik yang tidak tertangani, serta dampak eksternal dari aktivitas industri yang belum terkendali secara ekosistemik.

“Debu batu bara sangat berpengaruh dengan sirkulasi pernafasan. Batuk pilek, kalau semisal bukan musim hujan kami kelihatan, pustu dekat holding. Lantai jadi hitam, kalau kita hirup berpengaruh pada paru-paru kita.” (Bidan desa)

“Kalau musim angin Selatan, debu-debu sampai ni kerumah-rumah kita, sampai hitam lantai rumah (HR, Tokoh Masyarakat)



Dari sisi perilaku, pola hidup sehat masyarakat tampaknya belum menjadi bagian dari praktik keseharian. Minimnya akses air bersih dan sanitasi secara otomatis menghambat warga untuk menerapkan praktik kebersihan dasar seperti cuci tangan dengan air mengalir, konsumsi air matang, dan pembuangan sampah rumah tangga yang benar. Hal ini diperparah oleh keterbatasan edukasi kesehatan masyarakat dan belum masifnya program intervensi dari sektor kesehatan maupun pemerintah desa dalam membentuk budaya hidup sehat berbasis komunitas. Dalam jangka panjang, tanpa intervensi struktural dan edukatif, warga akan tetap hidup dalam kondisi lingkungan yang tidak sehat yang perlahan tapi pasti akan menurunkan kualitas kesehatan dan produktivitas Masyarakat

Kolaborasi Kesehatan selalu disuport oleh pemdes, seperti posyandu, posyandu lansia. Akhir tahun kami ada cek golongan darah semua usia, dan pemeriksaan Kesehatan secara gratis kami lakukan.(Bidan Desa)

Di sisi penguatan layanan, program kesehatan di Kaliorang menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan, khususnya dalam hal kolaborasi lintas pihak. Pemerintah desa secara konsisten memberikan dukungan terhadap kegiatan posyandu, termasuk posyandu balita dan posyandu lansia. Program pemeriksaan kesehatan gratis di akhir tahun, termasuk tes golongan darah untuk semua usia, merupakan langkah preventif yang penting untuk meningkatkan kesadaran kesehatan masyarakat. Adanya Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) yang aktif juga menjadi ujung tombak pelaksanaan kegiatan berbasis komunitas. Meski demikian, pengembangan posyandu remaja masih dalam tahap perencanaan, padahal kelompok usia ini juga rentan terhadap masalah kesehatan yang spesifik seperti anemia, gangguan mental, dan risiko perilaku menyimpang. Secara keseluruhan, meskipun Desa Kaliorang telah menunjukkan inisiatif yang baik dalam membangun kolaborasi dan layanan kesehatan berbasis desa, upaya tersebut masih perlu diperluas cakupannya, diperkuat kapasitasnya, dan dipastikan keberlanjutannya agar dapat menjawab kompleksitas persoalan kesehatan masyarakat secara lebih sistematis dan menyeluruh.



Stunting

Desa Kaliorang sempat menjadi lokus penanganan stunting pada tahun 2022, yang menandakan bahwa prevalensi kasus stunting, termasuk risiko dan dampak jangka panjang terhadap tumbuh kembang anak, masuk dalam kategori prioritas intervensi nasional. Dari data lapangan, tercatat sebanyak 22 anak berada dalam kondisi stunting atau berisiko tinggi mengalami stunting, dan sekitar 20 anak mengalami wasting, yaitu kondisi berat badan yang tidak sesuai dengan usia atau panjang badan, yang menunjukkan kekurangan gizi akut. Kondisi ini menjadi cerminan dari kompleksitas masalah gizi di Kaliorang, yang bukan hanya berkaitan dengan akses makanan sehat, tetapi juga terkait erat dengan kualitas air, sanitasi, dan pola asuh orang tua dalam merawat anak.

Angka stunting 2022 sempat jadi lokus, kolaborasi saat ini bukan lokus lagi. 22 anak resiko dan stuntingnya. Tahun ini berkurang, resiko berkurang, wasting juga berkurang. Kami melakukan pendamping, kader, pemdes, dan Perusahaan. Ada 20an masuk wasting seperti berat badan bayi tidak sesuai dengan umur.

(Bidan Desa)

Namun, perkembangan terkini menunjukkan adanya penurunan kasus stunting dan wasting di Kaliorang, hasil dari pendekatan kolaboratif antara berbagai pihak: kader kesehatan, pemerintah desa (Pemdes), serta dukungan dari pihak perusahaan. Pendampingan gizi, pemantauan tumbuh kembang anak, edukasi gizi untuk ibu, serta program intervensi langsung mulai memperlihatkan hasil nyata. Ini menjadi contoh praktik baik dari pendekatan pentahelix dalam penanganan isu kesehatan masyarakat desa, di mana partisipasi lintas sektor berhasil menurunkan angka kerentanan gizi pada balita. Meski saat ini desa Kaliorang tidak lagi menjadi lokus prioritas nasional, pendekatan yang telah berjalan patut dipertahankan dan bahkan diperluas agar tidak hanya bersifat reaktif, tetapi menjadi bagian dari sistem perlindungan dan pemantauan anak yang berkelanjutan.

Kendati menunjukkan hasil yang positif, keberhasilan ini masih perlu dibaca secara kritis. Pengurangan angka bukan berarti masalah telah selesai, terutama jika akar persoalan seperti akses air bersih yang buruk, sanitasi yang tidak merata, dan



kualitas pangan yang tidak selalu terjamin tetap berlangsung. Selain itu, status gizi anak sangat sensitif terhadap perubahan ekonomi rumah tangga, yang di Kaliorang sebagian besar bergantung pada sektor informal dan buruh. Oleh karena itu, penguatan sistem deteksi dini, keberlanjutan program pendampingan gizi, serta konsistensi komitmen dari pemerintah desa dan mitra perusahaan menjadi kunci dalam menjaga momentum keberhasilan ini dan mencegah kasus stunting atau wasting kembali meningkat di masa depan.

Desa Kaliorang telah menunjukkan bahwa dengan pendekatan kolaboratif, permasalahan stunting dan wasting dapat dikendalikan secara signifikan. Namun, perbaikan kondisi kesehatan anak harus diikuti dengan perbaikan struktural terhadap lingkungan dan ketahanan ekonomi keluarga, agar desa benar-benar keluar dari lingkaran kerentanan gizi dan mampu membangun generasi yang sehat, cerdas, dan produktif.

Perilaku hidup sehat dan kesadaran Masyarakat tentang Kesehatan masih rendah.

Tingkat kesadaran masyarakat Desa Kaliorang terhadap pentingnya kesehatan masih menunjukkan kesenjangan antara pengetahuan ideal dan praktik nyata di lapangan. Salah satu indikasi utamanya adalah perilaku kepala keluarga yang masih merokok di dalam ruangan meskipun terdapat balita di rumah. Praktik ini menunjukkan rendahnya pemahaman akan dampak kesehatan dari asap rokok terhadap anak-anak, terutama risiko gangguan pernapasan dan pertumbuhan. Selain itu, masih ditemukannya jamban yang tidak memenuhi standar sanitasi menjadi cerminan lemahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan sehat sebagai bagian dari upaya pencegahan penyakit berbasis lingkungan.

“Kepala keluarga masih merokok didalam ruangan, padahal ada balita”

(Kader KPM)

Respon masyarakat yang kurang, masih masa bodoh karena ini lingkungan saya.

Idealnya Masyarakat sadar pentingnya Kesehatan, maka kaliorang aman. Kami membentuk dasa wisma, ibu-bapak ngumpul disitu, dari situ saya menggali kenapa ko bisa seperti ini apa yang harus dilakukan?



(Bidan Desa)

Rendahnya respons masyarakat terhadap isu-isu kesehatan juga tampak dari sikap pasif yang mengakar: masih banyak warga yang menunjukkan sikap masa bodoh dengan alasan “ini lingkungan saya,” seolah-olah masalah kesehatan merupakan urusan pribadi, bukan tanggung jawab kolektif. Sikap ini menandakan belum terbentuknya budaya kesehatan sebagai nilai sosial bersama. Padahal, dalam masyarakat yang sadar kesehatan, kebersihan lingkungan, pola hidup sehat, dan perilaku pencegahan menjadi standar sosial yang dijaga bersama. Tanpa kesadaran kolektif ini, program-program kesehatan yang sudah dijalankan akan sulit mencapai dampak maksimal dan berisiko menjadi formalitas administratif semata.

Upaya untuk membangun kesadaran kesehatan sudah mulai dilakukan melalui pembentukan kelompok dasa wisma, yang menjadi ruang pertemuan ibu dan bapak untuk berbagi dan menggali persoalan-persoalan kesehatan di tingkat rumah tangga. Inisiatif ini penting sebagai strategi pemberdayaan berbasis komunitas, karena membuka ruang dialog untuk memahami akar persoalan dan mencari solusi bersama. Namun, agar dasa wisma tidak berhenti pada forum diskusi semata, perlu didorong keterlibatan aktif semua lapisan masyarakat, termasuk tokoh adat, pemuda, dan pelaku usaha lokal, dalam menciptakan ekosistem sosial yang mendukung perilaku hidup sehat. Dengan memperkuat sinergi antara edukasi, keteladanan, dan kontrol sosial, maka transformasi kesadaran kesehatan dari individu ke komunitas bisa lebih efektif dan berkelanjutan.

Kualitas lingkungan dan Perilaku hidup sehat

Kondisi lingkungan dan perilaku hidup sehat di Desa Kaliorang, Kecamatan Kaliorang, Kutai Timur menunjukkan adanya tantangan struktural dan ekologis yang kompleks, terutama terkait manajemen air bersih, sanitasi, dan pencemaran udara. Desa Kaliorang yang secara geografis berada di wilayah pesisir menghadapi kondisi tanah dan air yang kurang stabil dan rentan terhadap pencemaran, baik dari aktivitas domestik maupun industri. Berdasarkan temuan di lapangan, distribusi akses air bersih masih sangat timpang antar dusun: hanya Dusun 1 yang memiliki akses air bersih dari PDAM, sementara tiga dusun lainnya harus mengandalkan



sumur galian yang kualitasnya sangat memprihatinkan, keruh, berminyak, berbau logam seperti besi, bahkan terindikasi tercemar. Kondisi ini berdampak langsung terhadap kualitas hidup warga, terutama kelompok rentan seperti balita, yang disebut berisiko tinggi mengalami masalah gizi seperti stunting akibat paparan air tidak sehat yang digunakan untuk konsumsi maupun kebersihan diri.

Ketiadaan sistem sanitasi yang layak juga memperburuk situasi kesehatan lingkungan. Masih ada warga yang tidak memiliki fasilitas septik tank, yang artinya buangan limbah domestik berpotensi mencemari tanah dan sumber air di sekitarnya. Sampah domestik yang berserakan di sekitar pemukiman menambah beban lingkungan dan menjadi potensi berkembangnya penyakit. Minimnya perilaku hidup bersih dan sehat bukan hanya akibat ketidaksadaran, tetapi juga cermin dari ketiadaan sistem penanganan terpadu yang berbasis komunitas maupun dukungan dari lembaga desa. Akses terhadap infrastruktur dasar seperti tempat sampah, saluran pembuangan, dan air bersih belum menjadi bagian dari prioritas pembangunan secara menyeluruh, terutama di dusun-dusun yang jauh dari pusat desa.

“Isu lingkungan masih banyaknya sampah di sekeliling pemukiman warga, ada beberapa warga yang tidak memiliki septik tank, termasuk kendala di air bersih. Air bersih terjamin yang punya hanya dusun 1, tiga dusun lain air nya belum memadai.

Sumber air sangat penting untuk penghidupan dan balita. Karena disinikan lingkungan desa kaliorang berada dipesisir Pantai, jadi sumber air bersih sangat kurang, sumur galian mengalami enemaran, warna keruh, berminya, bau besi.

Sumber air kurang sehat. Dampaknya balita resiko berat badan stunting.”

. (Bidan Desa)

Secara keseluruhan, kondisi ini menuntut perencanaan program desa yang holistik dan kolaboratif antara pemerintah desa, masyarakat, lembaga kesehatan, dan mitra pembangunan. Arah kebijakan harus fokus pada tiga aspek utama: (1) pemerataan akses air bersih dan sanitasi melalui investasi infrastruktur dasar, (2) kampanye hidup sehat yang disesuaikan dengan konteks lokal dan berbasis keluarga, serta (3) advokasi terhadap perusahaan tambang untuk bertanggung



jawab atas dampak ekologis melalui mekanisme CSR yang konkret dan terukur. Tanpa ketiganya, Desa Kaliorang akan terus mengalami siklus kesehatan lingkungan yang tidak sehat dan menjauh dari visi pembangunan desa yang berkelanjutan dan inklusif.

II. Isu-isu Strategis dan Temuan Kunci

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa isu strategis yang bisa dirumuskan sebagai bagian dari proses transformasi desa adalah sebagai berikut:

A. Aspek pemerintahan

1. Kepatuhan Regulasi (Regulatory Compliance) dan Standarisasi Layanan
 - Pemenuhan standar administrasi pemerintahan desa (tertib prosedur)
 - Standarisasi praktik baik/rutin yang telah ada
 - Pendetilan standar dalam proses kerja (SOP)
2. Data dan Kebijakan berbasis bukti
 - Keberadaan dan kejelasan Indikator kinerja pemerintahan desa pada beragam urusan untuk kebijakan
 - Integrasi data dan sistem informasi (pusat data dan pemutakhiran)
3. Aset desa
 - Kejelasan/legalitas aset desa
 - Pengelolaan aset untuk PADes, pemberdayaan, dan/atau perlindungan sosial
4. Distribusi sebagian kewenangan desa
 - Desain peran, fungsi, dan kinerja Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)
 - Koherensi kinerja LKD terhadap kinerja pemerintahan desa, termasuk pengelolaan data
 - Standarisasi administrasi usulan program

B. Aspek ekonomi

1. Komoditas Utama (Pisang dan Sawit)



- Perlunya mitigasi risiko atas kegagalan panen.
 - Perlunya pemetaan kebutuhan penunjang pertanian (dalam & luar desa).
2. BUMDes
 - Aspek Bisnis - Terdapat peluang *Competitiveness* produk pupuk dan racun di pasaran
 - Aspek Manajemen - Prospektus usaha yang baik perlu didukung sistem manajemen yang efektif
 3. UMKM
 - Kreasi produk turunan pisang belum bekerja optimal di pasar sehingga perlunya pemetaan pasar dan rantai pasok
 4. Perikanan
 - Penurunan hasil tangkapan ikan serta Zonasi (area tangkap) dan standar alat tangkap ikan sehingga perlunya perlindungan area tangkapan dari ancaman aktivitas tambang dan alat tangkap yang merusak
 5. Wisata
 - Momentum restrukturisasi dan perbaikan administrasi melalui pencatatan rutin, inventarisasi aset, serta integrasi data dan konsolidasi pelaporan antara tiga (atau paling tidak dua) lembaga
 - Minimnya jumlah kunjungan reguler (sabtu-minggu), sehingga perlunya aktivasi ragam produk wisata lanjutan dan peningkatan okupansi aset wisata

C. Aspek sosial dan budaya

1. Sosial Budaya
 - Belum tersedianya dokumen Sejarah desa menyebabkan belum munculnya konstruksi identitas kaliorang yang menandai budaya kolektif.
 - Area pemukiman yang terfragmentasi memiliki potensi munculnya prasangka-konflik. Konflik berbaur etnis 2014, kecemburuan sosial pemilihan Lokasi produksi kalbana, penandatanganan pakta kerukunan (2025)



- Rendahnya spirit kewargaan yang ditandai: minimnya keterlibatan warga dalam aktivitas kemasyarakatan & minimnya pengetahuan warga terhadap lingkungan sosialnya.
- Terjadi stagnasi di sektor kepemudaan yang ditandai: tunggalnya jenis aktivitas minat dan kemandegan regenerasi yang berdampak pada lemahnya kapasitas tumbuh para pemuda

2. Pendidikan - kewargaan

- Data keluarga non warga kaliorang tidak tersedia yang menyebabkan anak-anak usia paud tidak bisa mengakses Pendidikan. Ada 10% anak usia paud yang tidak masuk paud.
- Ketiadaan sekolah SMA/SMK yang tersambung dengan kebutuhan industri, menyebabkan terhambatnya serapan warga untuk masuk ke Perusahaan. Hanya 10 persen dari 1000 an pendaftar yang bisa diterima Perusahaan: banyak gagal di psikotes dan kematangan personal
- Rendahnya kapasitas literasi, numerasi & karakter karena minimnya aktivitas pendidikan bagi anak & remaja di luar jam sekolah (Hanya ada aktivitas Pendidikan agama/TPA)
- Adanya anak putus sekolah dan tidak lanjut sekolah untuk SD & SMP (Masuk ke dunia kerja sawit)

3. Lingkungan dan kesehatan

- Persoalan sanitasi, sampah, dan kebersihan
- Pola pengasuhan orang tua yang tidak proper berakibat pada stunting. Masih ditemukan 22-25 anak stunting (2024-2025).
- Pernikahan dini masih terjadi pada rata-rata 3-5/tahun.
- Adanya fenomena KTD dan pernikahan anak/dini di kalangan remaja (3-5 kasus/tahun) karena faktor budaya
- Rendahnya derajat kesehatan warga yang memasuki usia awal angkatan kerja (success rate memasuki sektor formal 10 % tambang)
- Rendahnya kesadaran urgensi kesehatan di kalangan lansia (tingkat partisipasi di posyandu lansia 50 %).



BAB III

REKOMENDASI ATAS HASIL ASSESMENT

I. REKOMENDASI AREA PERBAIKAN STRATEGIS

A. Tata Kelola Pemerintah Desa

1. *Kepatuhan Regulasi (Regulatory Compliance) dan Standarisasi Layanan*

Kewenangan desa dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan perlu dikunci melalui pembentukan regulasi desa: PerDes, PerKades, SK (termasuk PerDes inisiatif BPD). Selain itu, diperlukan pembentukan ragam SOP penyelenggaraan administrasi dan layanan publik. Output dari program ini yaitu berkaitan dengan ketepatan waktu pemenuhan siklus penyelenggaraan pemerintahan. Adapun Perdes/Perkades yang sudah siap dibentuk dapat menggunakan konteks Pungutan Desa, Standar Pelayanan, dan SOP.

2. *Data dan Kebijakan Berbasis Bukti*

Dalam hal ini, diperlukan integrasi data sebagai dasar kebijakan di tingkat desa, serta dapat menjadi indikator kinerja pelayanan publik (administrasi dan penyediaan barang/jasa publik). Program ini dapat dimulai dengan penyusunan dan penetapan indikator kinerja pemerintahan yang diharapkan mampu mendukung perkembangan/status kinerja pemerintahan desa. Selain itu, diperlukan adanya pusat data dan keterbukaan informasi kepada publik yang dapat dimulai melalui perbaikan pusat data dan kualitas informasi dalam website desa. Terakhir, perlunya pemutakhiran data secara berkala atau *realtime*, sebagai pendukung inovasi kebijakan desa berbasis bukti.

3. *Aset Desa*

Perlunya identifikasi pada beberapa hal seperti tanah dan bangunan milik desa, aset produktif lainnya, serta status pemanfaatan aset. Program tersebut dapat dimulai melalui sertifikasi tanah desa, sistem pencatatan aset desa, serta pemanfaatan aset produktif untuk PADes, pemberdayaan, dan/atau perlindungan sosial. Upaya tersebut diharapkan mampu mendorong kontribusi pengelolaan aset terhadap PADes dan mengelola kejelasan status aset.



4. *Distribusi Sebagian Kewenangan*

Dalam hal ini, pemerintah desa perlu menyusun desain distribusi sebagian kewenangan kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang ada. Program tersebut dapat dimulai melalui pengaturan pada LKD yang ada dengan mengidentifikasi LKD yang aktif serta kapasitas aktualnya, serta penyusunan rencana kerja dan standar usulan program dan/atau kegiatan. Selain itu, LKD juga berperan dalam sistem pengumpulan dan pemutakhiran data sesuai lingkup masing-masing LKD yang sebelumnya dijelaskan pada sub-bagian Data dan Kebijakan. Upaya ini dapat dilakukan untuk mendorong kontribusi programatik LKD dalam pelayanan publik desa, serta standarisasi dokumen usulan program/kegiatan LKD.

B. Ekonomi

Menimbang kondisi yang ada, rekomendasi pengembangan ekonomi di Kaliorang perlu difokuskan pada beberapa hal yang di satu sisi mampu memberikan pengungkit pemajuan ekonomi di Kaliorang, dan disisi lain memiliki fisibilitas dikerjakan dalam jangka pendek (1-2 tahun). Rekomendasi-rekomendasi yang dimaksud diantaranya:

1. *Pemajuan Usaha BUMDes*

Usaha perdagangan pupuk dan racun pertanian yang dikelola BUMDes saat ini cukup prospektif dari segi bisnis. Besarnya market share serta market positioning yang dimiliki BUMDes saat ini perlu diperkuat dengan strategi intensifikasi pada bisnis yang sudah dijalankan. Dalam hal ini, terdapat dua hal yang penting dilakukan:

Pertama, pemetaan kebutuhan pupuk dan racun pertanian pada target pasar yang disasar (± 3 desa) perlu dilakukan untuk memproyeksi arus barang dagangan. Pemetaan ini juga sangat penting untuk memproyeksikan cashflow, serta kebutuhan modal. Aktivitas ini juga penting untuk menskenariokan proses bisnis yang akan dilakukan (distandarisasi). Output utama dari aktivitas ini adalah feasibility study dan business plan.

Kedua, penguatan aspek manajemen BUMDes. Tingginya prospektus bisnis yang ada perlu dikelola dengan tepat, guna mencegah terjadinya fraud akibat



mismanajemen. Sistem manajemen yang kuat juga merupakan aspek krusial sebagai pengendalian internal, basis evaluasi, serta bentuk pertanggungjawaban BUMDes terhadap konstituennya. Output utama dari aktivitas ini yaitu adanya sistem manajemen integratif dan real-time, khususnya pada sistem keuangan, stok opname, hutang piutang, serta manajemen aset

2. *Pengembangan Daya Tarik Wisata Pantai Marang*

Besarnya aset yang ada di Pantai Marang tidak serta merta mendongkrak angka kunjungan wisata. Infrastruktur jalan memang masih menjadi tantangan serius. Namun, inisiatif-inisiatif pengembangan daya tarik wisata tetap perlu dilakukan. Rekomendasi yang kami sajikan dalam hal ini memiliki dua orientasi utama, *Pertama*, orientasi keluar melalui aktivasi media dan produksi ragam material promosi, serta identifikasi produk dan pemaketan wisata. Aktivitas ini penting dilakukan sebagai bahan komunikasi keluar, sekaligus membangun posisi pantai marang sebagai destinasi wisata unggulan.

Kedua, orientasi ke dalam, dengan membangun tata kelola wisata yang kuat. Aktivitas-aktivitas yang penting dilakukan disini setidaknya mencakup dua hal; penyusunan kode etik wisata dan sistem informasi wisata. Selain itu, momentum restrukturisasi dan visi perbaikan manajemen yang digaungkan kepengurusan saat ini perlu dikelola secara berkelanjutan. Pada sisi ini, pengembangan sistem pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset penting dilakukan.

3. *Pengembangan Komoditas Pisang*

Pada sisi hilir (produksi/pertanian), kemudahan petani untuk membawa hasil panen pisang ke titik pertemuan dengan tengkulak (distributor) masih menjadi tantangan serius. Gagasan pemerintah desa untuk menyediakan *cabloway* akan cukup membantu pemanenan pisang.

Sedangkan pada aspek lanjutan (*value added* komoditas melalui pengembangan produk turunan), hal krusial yang perlu dilakukan adalah melakukan riset pasar lokal atas produk turunan pisang. Riset pasar dilakukan untuk memetakan *supply and demand*, sehingga pengembangan usaha terhadap komoditas ini menjadi lebih dekat dengan apa yang dibutuhkan pasar. Pendetilan perlu dilakukan mulai dari kapasitas produksi, rantai pasok yang terjadi saat ini,



hingga ragam jenis dan sebaran produk turunan pisang (termasuk kuantitas, kompetitor, nilai transaksi, dll.)

4. *Perlindungan Area Tangkapan Ikan*

Ancaman degradasi lingkungan secara langsung berdampak pada hasil tangkapan ikan oleh nelayan yang terus menurun. Perlindungan area tangkapan ikan perlu dilakukan melalui penerbitan regulasi untuk melindungi area tangkapan dari ancaman aktivitas tambang dan alat tangkap yang merusak dengan melakukan pengaturan pada zonasi (area tangkap) dan standar alat tangkap ikan.

C. Sosial dan Budaya

1. *Penyediaan ruang public kreatif (Kaliorang Creative Space)*

Penyelenggaraan Pasar Event sebagai ruang public untuk perjumpaan-perjumpaan antar warga dari berbagai etnis dan agama, dalam rangka meningkatkan praktik hidup Bersama-toleransi dan kerukunan.

Program Penyelenggaraan Pasar Event merupakan inisiatif strategis untuk membangun kohesi sosial dan memperkuat identitas kolektif Desa Kaliorang melalui penciptaan ruang publik yang terbuka, inklusif, dan berkelanjutan. Program ini dirancang sebagai ruang perjumpaan warga lintas etnis, agama, dan usia dalam suasana non-formal, dengan format pasar tematik yang menggabungkan unsur ekonomi lokal, seni budaya, kuliner tradisional, hingga pertunjukan komunitas. Pasar ini tidak hanya menjadi sarana promosi UMKM dan produk lokal, tetapi juga sebagai panggung ekspresi budaya masing-masing komunitas, serta arena dialog dan interaksi sosial yang menghapus sekat-sekat primordial yang selama ini membentuk pola pemukiman dan relasi sosial yang terfragmentasi. Melalui event ini, diharapkan tumbuh kebiasaan hidup bersama yang lebih terbuka, saling menghargai, dan memperkuat fondasi kerukunan sebagai pilar utama transformasi sosial Kaliorang. Output: terbentuknya ruang interaksi lintas kelompok yang aktif dan terbuka, di mana warga Kaliorang dapat saling mengenal, mengapresiasi perbedaan, serta membangun rasa saling percaya yang menjadi pondasi penting bagi kerukunan sosial. Output: munculnya inisiatif warga untuk memelihara keberagaman secara organik melalui partisipasi dalam kegiatan bersama seperti



pertunjukan seni antar-etnis, bazar makanan tradisional berbagai suku, atau diskusi kebudayaan lokal, sehingga nilai-nilai toleransi tidak hanya menjadi wacana, tetapi hadir nyata dalam praktik hidup sehari-hari.

Penyediaan ruang publik kreatif pemuda (sinergikan pemanfaatan & aktivasi pantai marang) untuk mendorong adanya talenta baru dengan ragam jenis aktivitas serta memunculkan kader-kader muda dari kelompok usia remaja.

Program Ruang Publik Kreatif Pemuda Kaliorang bertujuan mengaktivasi kawasan Pantai Marang sebagai ruang ekspresi dan pengembangan bakat anak-anak muda, khususnya remaja, melalui berbagai kegiatan kreatif seperti seni, olahraga, teknologi, kewirausahaan, dan forum kepemudaan. Dengan mensinergikan potensi alam dan energi generasi muda, program ini mendorong lahirnya talenta-talenta baru sekaligus mencetak kader-kader muda desa yang aktif, inovatif, dan berdaya saing, serta mampu berkontribusi dalam pembangunan sosial-budaya Kaliorang secara berkelanjutan. Output utama dari program ini adalah tersedianya ruang aman dan inspiratif bagi remaja untuk menyalurkan minat dan bakat mereka, yang sebelumnya belum terfasilitasi di desa. Output kedua adalah terbentuknya komunitas kreatif pemuda lintas minat: seperti seni visual, musik, olahraga, dan digital, yang aktif menyelenggarakan kegiatan mandiri dan kolaboratif. Output ketiga, program ini akan menghasilkan kader-kader muda yang memiliki kepemimpinan sosial dan kesadaran komunitas, yang ke depan dapat mengambil peran dalam inisiatif pembangunan desa maupun menjadi representasi positif generasi muda Kaliorang.

2. *Program Desa Layak Anak*

Desa Layak Anak untuk meletakkan hak-hak anak sebagai bagian dari pelayanan pemerintah desa Kaliorang.

Program Desa Layak Anak di Kaliorang dirancang untuk memastikan bahwa hak-hak anak—termasuk hak atas pendidikan, perlindungan, kesehatan, dan partisipasi—menjadi bagian integral dari pelayanan dan kebijakan pemerintah desa. Melalui program ini, desa berkomitmen menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal, serta mendorong partisipasi anak dalam kegiatan sosial secara terarah. Selain itu program ini



difungsikan untuk pencegahan pernikahan usia dini, maupun penanggulangan kehamilan tidak diinginkan, termasuk menekan angka stunting. Output utama dari program ini adalah terbentuknya regulasi dan mekanisme desa yang responsif terhadap isu anak, seperti forum anak desa, sistem perlindungan anak berbasis masyarakat, dan layanan aduan ramah anak yang operasional di tingkat desa.

Aktivasi **posyandu remaja** untuk literasi dan layanan Kesehatan reproduksi remaja melalui PIK-R

Program Aktivasi Posyandu Remaja bertujuan menyediakan ruang literasi dan layanan kesehatan reproduksi yang ramah remaja melalui penguatan peran Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R). Melalui pendekatan edukatif dan partisipatif, program ini mendekatkan informasi penting seputar kesehatan reproduksi, gizi, dan kesehatan mental kepada remaja secara terstruktur dan berkelanjutan, sekaligus membangun kesadaran remaja terhadap pentingnya pengambilan keputusan sehat dan bertanggung jawab. Output utama dari program ini adalah terbentuknya tim PIK-R aktif di desa Kaliorang yang mampu mengelola kegiatan literasi, konseling, dan rujukan layanan kesehatan remaja secara mandiri dan terjadwal.

Program Desa Ramah Lansia: Posyandu Lansia Plus yaitu aktivasi layanan posyandu lansia setiap dusun (dengan jadwal berkala/bulan), serta penambahan layanan posyandu lansia secara kreatif dan rekreatif untuk menarik minat lansia mengakses layanan di posyandu.

Program ini bertujuan mengaktifkan layanan kesehatan lansia secara merata di setiap dusun melalui jadwal berkala setiap bulan, sekaligus memperluas fungsi posyandu menjadi ruang yang tidak hanya melayani kebutuhan medis, tetapi juga menjadi tempat berkegiatan sosial, kreatif, dan rekreatif bagi para lansia. Dengan pendekatan yang menyenangkan dan partisipatif, program ini mendorong lansia untuk lebih aktif datang ke posyandu, menjaga kesehatan fisik maupun mental, serta memperkuat ikatan sosial antar warga usia lanjut. Output utama dari program ini adalah terselenggaranya posyandu lansia dengan layanan lengkap dan pendekatan kreatif, seperti senam, permainan tradisional, atau terapi kelompok yang diikuti secara rutin oleh lansia di seluruh dusun.



mewujudkan Desa Layak Anak (DLA) sebagai bagian dari strategi pembangunan sosial yang berkelanjutan. Untuk itu, Desa Kaliorang menyusun kebijakan dan program yang tidak hanya melindungi dan memenuhi hak anak, tetapi juga mengintegrasikannya dengan pengembangan sektor ekonomi desa, khususnya melalui penguatan daya tarik wisata Pantai Marang dan pengelolaan BUMDes.

Langkah awal dalam transformasi ini adalah menyusun Peraturan Desa tentang Desa Layak Anak (Perdes DLA) yang menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan berbagai program terkait pemenuhan hak anak. Perdes ini diperkuat dengan pembangunan pangkalan data yang memuat informasi penting tentang kondisi anak di desa, indikator pemenuhan hak, serta status pencapaian terhadap standar DLA. Data ini akan menjadi rujukan utama bagi desa untuk mengambil keputusan dan menyusun program yang berbasis pada bukti (*evidence-based policy/EBP*).

Selaras dengan semangat perlindungan anak, Desa Kaliorang akan menyediakan Ruang Kreatif dan Ruang Bermain Anak yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak. Fasilitas ini juga dirancang agar terintegrasi dengan kawasan wisata Pantai Marang, sehingga pengunjung yang datang bersama keluarga tetap bisa memberikan ruang yang layak bagi anak-anak mereka untuk beraktivitas. Dengan demikian, ruang bermain bukan hanya menjadi bagian dari pemenuhan hak anak, tapi juga bagian dari strategi pengembangan wisata desa.

Transformasi wisata desa sendiri ditandai dengan penyusunan dan penetapan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Pantai dan Pungutan. Aturan ini tidak hanya mengatur tata kelola dan retribusi wisata, tetapi juga memperkuat peran masyarakat dalam mengelola potensi wisata secara partisipatif. Dalam implementasinya, desa akan mengembangkan berbagai paket wisata yang tidak hanya menarik secara ekonomi, tetapi juga edukatif dan ramah keluarga.

Untuk mendukung keberlanjutan ekonomi dari sektor pariwisata ini, BUMDes bersama POKDARWIS menjadi aktor utama dalam pengelolaan layanan wisata, termasuk pengelolaan paket, optimalisasi aset, hingga penjualan produk lokal. Oleh karena itu, desa akan menyusun Perdes Penyertaan Modal untuk BUMDes, yang dilengkapi dengan studi kelayakan dan business plan sebagai dasar pengambilan keputusan investasi. Manajemen BUMDes juga akan diperkuat dari sisi pengelolaan keuangan, aset, serta kapasitas SDM.

Semua program ini akan dilandasi oleh prinsip *Evidence-Based Policy (EBP)*, yaitu setiap keputusan dan kebijakan desa harus berdasarkan data yang valid dan terverifikasi. Sistem data yang terbangun dari awal akan menjadi pilar utama bagi akuntabilitas dan efektivitas program, baik di sektor sosial maupun ekonomi.



Sebagai penunjang keberhasilan program, optimalisasi media informasi desa juga menjadi bagian penting. Website desa dan kanal media sosial akan difungsikan sebagai sarana informasi berbagai praktik baik yang telah dilakukan baik melalui promosi wisata, edukasi publik terkait hak anak, serta transparansi pengelolaan program dan keuangan desa. Dengan desain yang integratif ini, Desa Kaliorang tidak hanya bergerak menuju status sebagai Desa Layak Anak, tetapi juga diharapkan mampu menciptakan perubahan nyata di berbagai lini kehidupan masyarakat, dengan semangat kolaborasi, inklusivitas, dan keberlanjutan.

B. Roadmap

NO	PROGRAM	KEGIATAN	LINIMASA (BULAN)								
			4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Desa Layak Anak (DLA) 1. Penguatan Kelembagaan 2. Klaster hak anak 3. Hak Sipil dan Kebebasan 4. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif 5. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan 6. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya 7. Perlindungan khusus	Focus Group Discussion Desa Layak Anak (DLA)									
		Penguatan Kelembagaan - Pembentukan Tim Kerja Desa Layak Anak (DLA)									
		Identifikasi pemenuhan indikator Desa Layak Anak (DLA)									
		Uji Coba Pantai Marang sebagai Ruang Kreatif Ruang Bermain Ramah Anak									
2	Evidence-Based Policy (EBP)	Integrasi Pangkalan Data untuk mendukung kebijakan Desa Layak Anak (DLA)									
		Penyusunan Perdes Desa Layak Anak (DLA)									



		Penyusunan Perdes Pengelolaan dan Pungutan di Pantai Marang										
		Diseminasi Kebijakan Desa Layak Anak (DLA)										
3	Daya Tarik Wisata (DTW) Pantai Marang	Focus Group Discussion (FGD) Pengelolaan Pantai Marang bersama lembaga terkait										
		Penyusunan aktivasi ragam produk wisata lanjutan										
		Peningkatan Okupansi Aset Wisata										
		Workshop Optimalisasi Pengelolaan Media										
4	Manajemen BUMDes	Optimalisasi Pencatatan dan Pelaporan Keuangan dalam pengelolaan Wisata Pantai Marang										
		Penyusunan Paket Wisata										
		Manajemen Aset										